



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LMCK

LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA

| 2024

TRIWULAN II



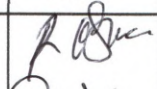
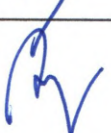
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Raden Oesman, S.E., M.M Endri Gunawan, A.Md	Staf Perencanaan dan Pelaporan	15/7 2024 15/7 2024	 
2	Diperiksa	Budi Santoso, S.SiT.,M.M.Tr	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	15/7/24	
3	Diperiksa	Djoko Srijanto, ATD.,M.Si	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	15/07/24	
4	Diperiksa	Dedi Setiawan, S.Sos	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	15/07/24	
5	Diperiksa	Taofan Andriana, S.T.M.A	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	15/7 24	
6	Disetujui	Bambang Siswoyo, S.T., M.T	Kepala BPTD Kelas II Lampung	16/7 24	



KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Lampung bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Lampung merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Lampung yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2024.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Pemerintah (LMCK) Triwulan II Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 10 Indikator dari 5 Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung telah melaksanakan dengan baik, Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) sebanyak 10 IKK dilaksanakan di tahun 2024.

Hasil pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.



Kami berharap Laporan Monitoring Kinerja Pemerintah (LMCK) Triwulan II ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun tahun mendatang.

Bandar Lampung, 16 Juli 2024

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung**



BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T

NIP. 19710809 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	3
I.3. Sumber Daya Manusia	5
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	6
I.5. Sistematika Laporan	9
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	13
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan 2024	15
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
I.7.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	22
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	23

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

• Uraian Sasaran Program

III.2.1.1 IKK 1 Presentase pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Definisi Indikator Kinerja	27
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	27
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	27
• Narasi Faktor Keberhasilan	28
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	28
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	28
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	28
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan	28

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	28
II.2.1.3 IKK 3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beropersi	
a.1 Definisi Indikator Kinerja	29
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	30
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	30
• Narasi Faktor Keberhasilan	31
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	31
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	31
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	31
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capain Keuangan	31
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	32
III.2.1.6 IKK 6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	
a.1 Definisi Indikator Kinerja	32
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	33
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	33
• Narasi Faktor Keberhasilan	35
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	35
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	35
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	35
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capain Keuangan	36
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	36

III.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Program

III.2.2.3 IKK 3 Presentase Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimun (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1 Definisi Indikator Kinerja	36
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	36
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan • Narasi Dasar Hukum • Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja • Narasi Faktor Keberhasilan • Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan • Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja • Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja • Narasi Pagu, Realisasi, dan Capain Keuangan	38
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	39

III.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Program

III.2.3.1 IKK 1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1 Definisi Indikator Kinerja	40
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	40
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan • Narasi Dasar Hukum • Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja • Narasi Faktor Keberhasilan • Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan • Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja • Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja • Narasi Pagu, Realisasi, dan Capain Keuangan	41
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	43

III.2.3.5 IKK 5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1 Definisi Indikator Kinerja	44
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	44
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	44
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	44
• Narasi Faktor Keberhasilan	45
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	45
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	45
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	45
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan	45
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	46

III.2.3.7 IKK 7 Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1 Definisi Indikator Kinerja	47
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	47
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	47
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	47
• Narasi Faktor Keberhasilan	48
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	48
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	48
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	48
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan	48
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	49

III.2.4 SK4 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

• Uraian Sasaran Program

III.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	
a.1 Definisi Indikator Kinerja	50
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	50
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	51
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	51
• Narasi Faktor Keberhasilan	51
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	52
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	52
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	52
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan	52
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	52
III.2.5 SK5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel Uraian Sasaran Program	
III.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran DITJEN Perhubungan Darat	
a.1 Definisi Indikator Kinerja	53
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	54
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	54
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	54
• Narasi Faktor Keberhasilan	55
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	55
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	55
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	55
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan	55
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	56
II.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	56
II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024	56
II.3.1.1 Pagu Anggaran	56

a. 1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024	56
a. 2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024	56
a. 3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran	56
II.3.2.2 Refocusing Anggaran Tahun 2024	
a. 1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024	57
a. 2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024	58
a. 3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A 2024	59
a. 4. Rincian Program-program Kegiatan DIPA T.A 2024	60
II.3.2.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2024 ...	61
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	
II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Kegiatan.....	63
II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	64
II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	64
II.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	66
II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
II.3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keu ..	68
II.3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Man ..	69
II.3.3.3 Hambatan dan Kendala	70
BAB III PENUTUP	
III.1 Penutup	71
III.1.1 Ringkasan Capaian	71
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	73

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung ..	5
Tabel I.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sesuai Draft Rencana Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020-2024	14
Tabel I.3	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	15
Tabel I.4	Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	17
Tabel I.5	Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	20
Tabel II.1	Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024.....	25
Tabel II.2	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024	56
Tabel II.3	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024	56
Tabel II.4	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan II TA. 2024.....	56
Tabel II.5	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan II TA. 2024	57
Tabel II.6	Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2024.....	57
Tabel II.7	Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2024	58
Tabel II.8	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2024	59
Tabel II.9	Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024	60
Tabel II.10	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024.....	61
Tabel II.11	Kegiatan Program dan Kegiatan yang ada dalam DIPA.....	63
Tabel II.12	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II 2024	64
Tabel II.13	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II.....	64
Tabel II.14	Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	66
Tabel II.15	Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	66
Tabel II.16	Efisiensi Anggaran	68
Tabel II.17	Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Lampung	69
Tabel II.18	Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	27
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	29
Gambar II.3	Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Yang Beroperasi	33
Gambar II.4	Grafik Data Produksi Pelabuhan Bakauheni	34
Gambar II.5	Grafik Capaian IKK Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	37
Gambar II.6	Grafik Capaian IKK Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	41
Gambar II.7	Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	44
Gambar II.8	Grafik Capaian IKK Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	47
Gambar II.9	Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	50
Gambar II.10	Grafik Capaian IKK kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	54
Gambar II.11	Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-Tahun 2024	61
Gambar II.12	Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I s/d Triwulan II Tahun 2024	65

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;**
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;**
- 3. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024;**
- 4. Rencana Aksi Tahun 2024**
- 5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2024;**
- 6. Monitoring Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024;**
- 7. Lain – lain yang dianggap perlu.**

PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.



I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung berdasarkan klasifikasinya termasuk kelas Tipe A yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri ;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan ;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai

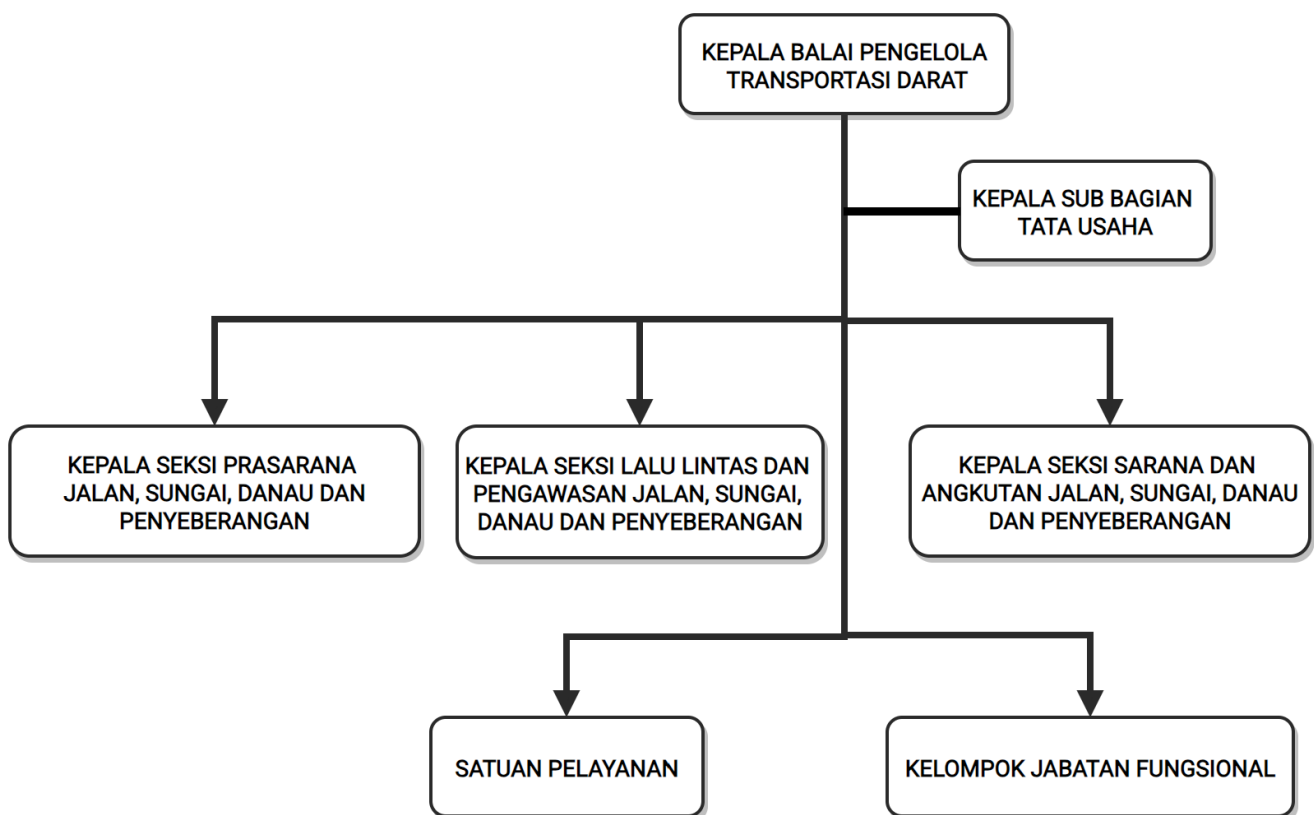


danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi



a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas Melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b) Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

c) Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

d) Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan,



dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pelayanan yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung meliputi :

1. Satuan pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Rajabasa
2. Satuan pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Betan Subing
3. Satuan pelayanan UPPKB Way Urang
4. Satuan pelayanan UPPKB Simpang Pematang
5. Satuan pelayanan UPPKB Blambangan Umpu
6. Satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
7. Satuan pelayanan Pelabuhan Wiralaga
8. Satuan pelayanan Pelabuhan Danau Lumbok

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung menaungi sebanyak 300 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Lampung

NO.	KETERANGAN	ASN	PPNPN	TOTAL
1	KANTOR INDUK	88	46	134
2	UPPKB WAY URANG	23	14	37
3	SATPEL PELABUHAN BAKAUHENI	19	27	46
4	TERMINAL RAJABASA	30	31	61
5	TERMINAL BETAN SUBING	6	12	19
6	UPPKB BLAMBANGAN UMPU	0	2	2
7	UPPKB SIMPANG PEMATANG	0	1	1
	TOTAL	300		



I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung memetakan potensi, Isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi.

1.4.1 Potensi yang dimiliki oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung, adalah sebagai berikut:

1. Wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung yang meliputi Seluruh Provinsi Lampung yang terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
2. Dengan adanya sebagian pelimpahan kewenangan pusat ke Balai yang memotong jarak dan waktu birokrasi tentunya akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan transportasi darat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;
3. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi darat yang terdiri dari 2 (dua) terminal tipe A, 3 (tiga) pelabuhan dan penyeberangan dan 3 (tiga) Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung;
4. Adanya penambahan sumber daya manusia pada tahun 2024, yang ditempatkan tersebar di satuan pelayanan maupun seksi teknis dan subbag tata usaha;
5. Perkembangan teknologi baik peralatan dan informasi beserta personil yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi tersebut yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan mulai tahap perencanaan, pembangunan serta pemeliharaan;
6. Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah yang dalam hal ini adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dan Dinas Perhubungan se-Provinsi Lampung.

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Pesmbentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah



pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki satuan pelayanan belum berfungsi secara optimal.

1.4.3 Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

1.4.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

1.4.5 Pemasalahan

Permasalahan yang dihadapi Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi :

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan menyebabkan kerusakan di jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, hal ini disebabkan Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal Karena keterbatasan fisik/peralatan SDM dan sistem manajemen.
2. Terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan Belum kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
3. Masih terdapatnya ruas jalan nasional yang belum optimal dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan.
4. Tidak optimalnya penggunaan simpul transportasi sebagai integrasi antar moda angkutan
5. Masih adanya perusahaan karoseri di Provinsi Lampung yang memiliki SKRB



6. Masih adanya daerah yang belum memiliki peralatan pengujian kendaraan bermotor.
7. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antar kota antar provinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah;
8. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat disiplin pengguna jalan;
9. Rendahnya law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas, Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/ atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/ atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
10. Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan;
11. Kendala Transportasi Wilayah Perbatasan, disebabkan karena minim infrastruktur, tingginya ketidakpastian atau ketidakteraturan jadwal, Mahalnya biaya perjalanan terutama pada wilayah perbatasan, Rawan Kecelakaan, Tidak bersinerginya kebijakan dan Implementasi.
12. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
13. Masih belum tersusunnya data sarana prasarana transportasi penyeberangan;
14. Ketersediaan data trayek transportasi SDP di beberapa daerah belum tersimpan dengan baik;
15. Belum dilaksanakannya penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota;
16. Belum adanya buku petunjuk-pelayaran sungai dan danau
17. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
18. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
19. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.



I. 4. **Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- **Bagan Struktur Organisasi**

I.3 Sumber Daya Manusia

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

I.7.1 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

- **Uraian Sasaran Program**

II.2.1.1 IKK1.1 Presentase pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.6 IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

II.2.2.3 IKK2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang



II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

II.2.3.1 IKK3.1 Presentase Perengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.5 IKK2.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024,

II.2.2.7 IKK2.7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

II.2.2.3 IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel

- **Uraian Sasaran Program**

II.2.2.4 IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran DITJEN Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024



- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 - 2024

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

II.3.5. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
4. Rencana Aksi Tahun 2024;
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2024;
6. Monitoring Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024;
7. Lain – lain yang dianggap perlu



I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung.



Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sesuai Draft Rencana Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	2023	2023	2024
SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
	IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi					
	IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	2	2	2	3
	IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi					
	IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%					
	IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1	2	2	3	4
SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%					
	IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0	0	0	0	30
	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	80	80	80	80
SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	80	80	80	80
	IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	99,7				
	IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	13	1	0	21	20

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	2023	2023	2024
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi						
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang		-	2000	1000	1000	1000
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit						
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	30	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi						
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraa n Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	70	80	80	80	80	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	70	80	83,9	83,96	83,98	84

1.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

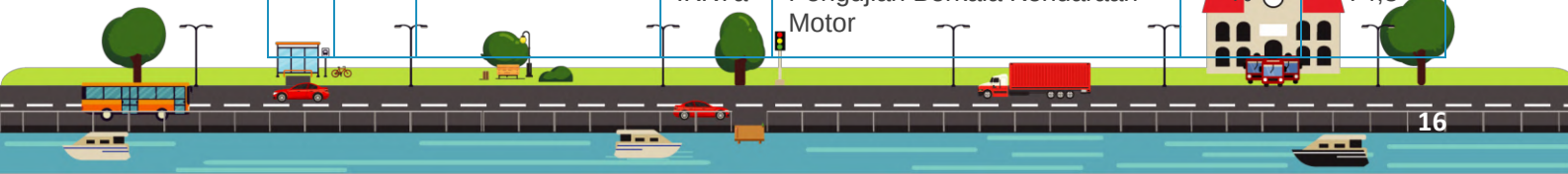
Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung kontrak kinerja antara Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan	IKK1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
		Antarmoda Transportasi	IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	3
			IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integritas Moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	4
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	0
			IKK2.2	Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0
			IKK2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80
			IKK3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	0
			IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	20
			IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000
			IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	0
			IKK7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Motor	%	74,8



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
			IKK7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP	Lokasi	0
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

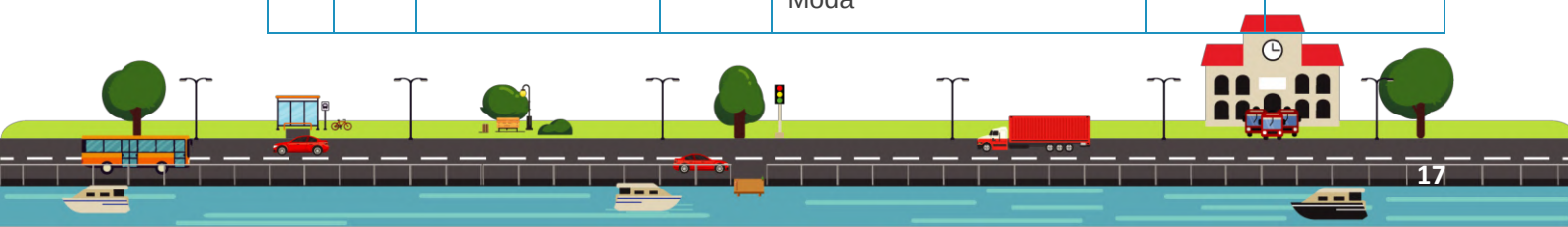
1.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

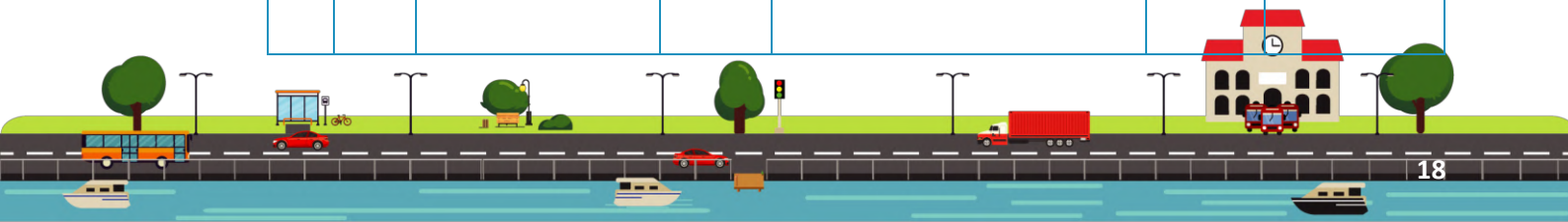
Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 121.428.966.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	3
			IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integritas Moda	Lokasi	0



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
			IKK1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	4
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	0
			IKK2.2	Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0
			IKK2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80
			IKK3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	0
			IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0
			IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000
			IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	0
			IKK7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Motor	%	74,8
			IKK7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP	Lokasi	0



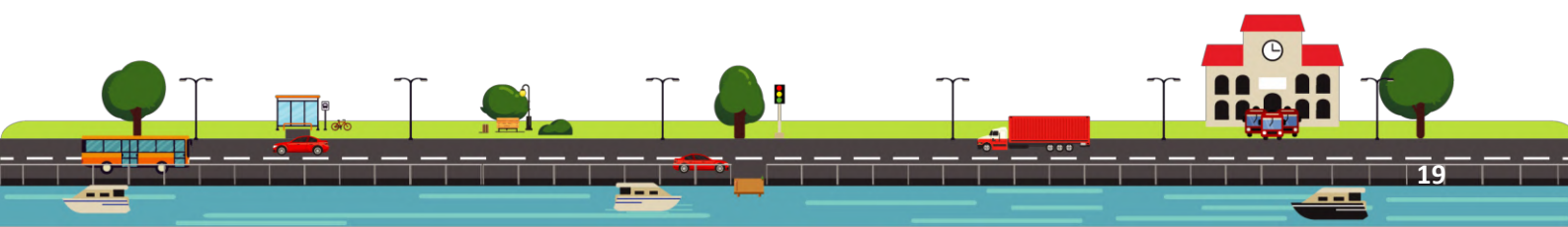
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
4	SK4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80
5	SK5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK5.2	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 7.057.387.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 26.144.939.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 37.215.023.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 21.149.216.000
5.	Pengelola Organisasi dan SDM	Rp. 7.438.410.000
6.	Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 22.423.991.000

1.7.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

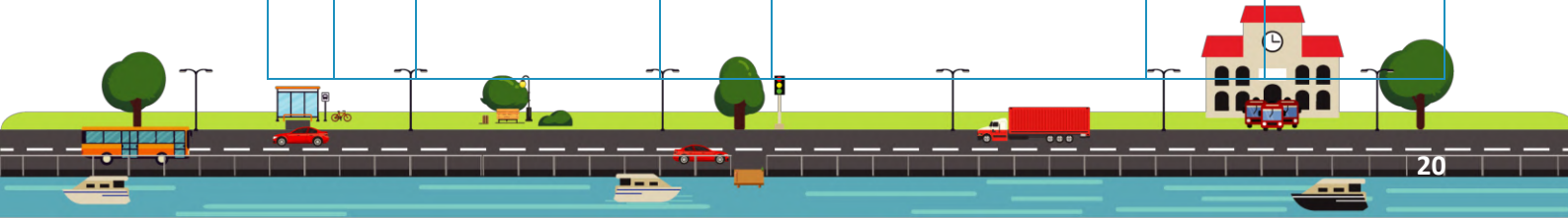
Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 128.730.005.000,- adalah sebagai berikut:



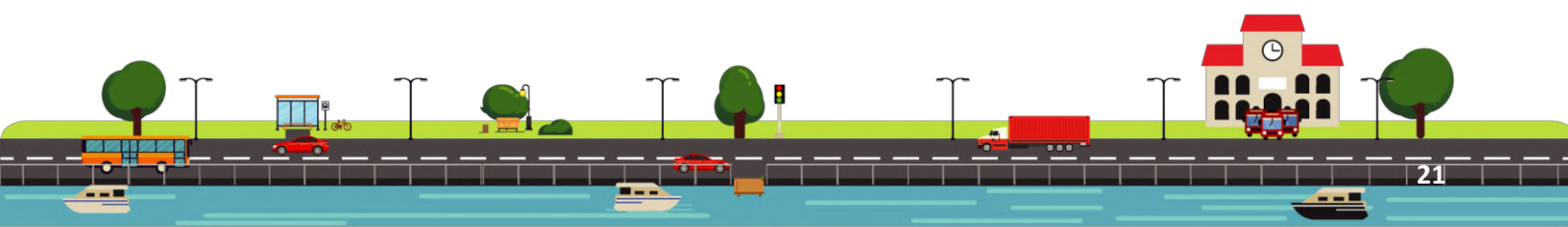
Tabel I.5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integritas Moda	Lokasi	0
			IKK1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan	%	0
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	7
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	0
			IKK2.2	Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0
			IKK2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80
			IKK3.2	Presentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	0
			IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0
			IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000
			IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	0
			IKK7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Motor	%	74,8
			IKK7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP	Lokasi	0
4	SK4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80
5	SK5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK5.2	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 7.057.387.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 27.987.309.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 37.215.023.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 21.149.216.000
5.	Pengelola Organisasi dan SDM	Rp. 7.438.410.000
6.	Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 22.423.991.000



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:



- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.



Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				SATU AN	TARG ET	Q I			Q II		
						T	R	C	T	R	C
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						100%			100%	
IKK 1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	100	100	100%		
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%	2	2	100%		
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	7	7	7	100%	7	7	100%		
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat						100%			100%	
IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80	80	80	100%	80	80	100%		
SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi						50%			59,3%	
IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80	80	0	0%	80	30	37,5		
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%		
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosssialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000	1000	0	0%	1000	1000	0		
IKK 3.7	Presentase Standarisasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	%	74,8	74,8	74,8	100%	74,8	74,8	100%		
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Tranportasi Darat						100%			100%	
IKK 6.1	Kualiatas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80	80	80	100%	80	80	100%		
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						100%			100%	
IKK 7.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	84	84	100%	84	84	100%		
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program							90%			91,8%	
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program							80%			83,7%	

Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)	8
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)	2



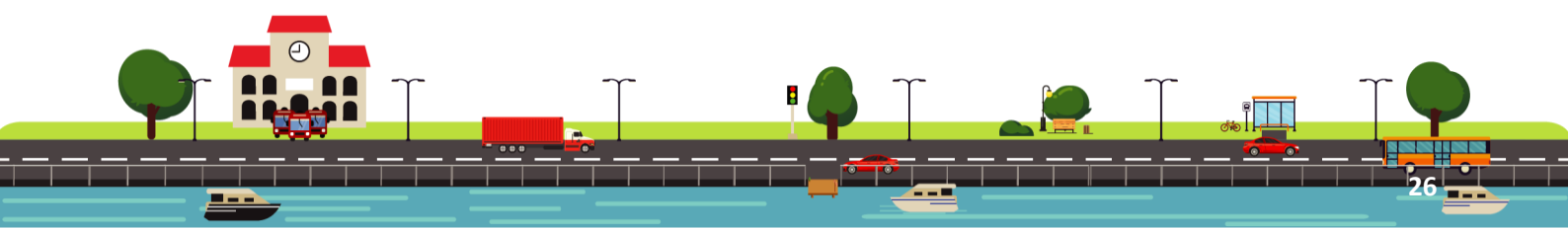
Selama tahun 2024, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 19 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

II.2.1 Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung merupakan salah satu balai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (Enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
- IKK 1.3 Jumlah Terminl Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi
- IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi



II.2.1 IKK 1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

Capaian kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 100 % maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1** Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.



a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5467/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 30 November tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024, sebanyak 7 (Tujuh) trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis.
- Adapun Data Realisasi Ritase dan Load Factor Angkutan Perintis Provinsi Lampung Tahun 2024 Yaitu :
 - Pringsewu - Sendang Agung
 - Daya Murni - SP. Propau
 - Rajabasa - Jabung
 - Bandar Jaya – Sulusuban-Padang Ratu-Kalirejo
 - Margomulyo-Karanganyar-Natar (Simpang Tiga RS Medika Natar)



6. Liwa - Kebon Tebu
7. PS Panarangan Jaya – Negara Batin

- Faktor keberhasilan :
 1. Tercapainya jumlah trayek yang terlayani
 2. Tercapainya progres anggaran sesuai jadwal
 3. Tercapainya layanan angkutan printis terhadap masyarakat.
- Faktor kegagalan :
 1. Tidak tercapainya jumlah trayek
 2. Tidak sesuai progres anggaran berdasarkan jadwal yang telah ditentukan
 3. Tidak semuanya masyarakat mendapatkan pelayanan angkutan printis.
- Untuk menghitung Realisasi Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Persentase Trayek Angkutan Perintis di Jalan}}{\text{Persentase Trayek Angkutan Perintis yang direncanakan}}$$

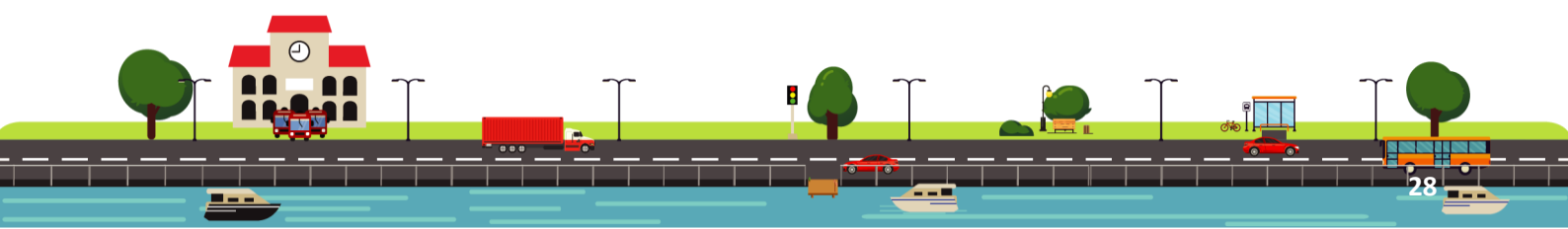
- Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2024 terhadap terget Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024. Pagu Anggaran Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan senilai Rp. 4,557,387,000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 1.363.636.380,- atau mencapai 29,92% dan nomor nomenklatur POK : 4637.QAH.001

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:



1. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah-daerah tersebut.
2. Melakukan Kajian/Survey Ulang kebutuhan masyarakat terkait rute perintis yang dilalui masyarakat
3. Mengusulkan rute layanan perintis ke Dirjen Angkutan.

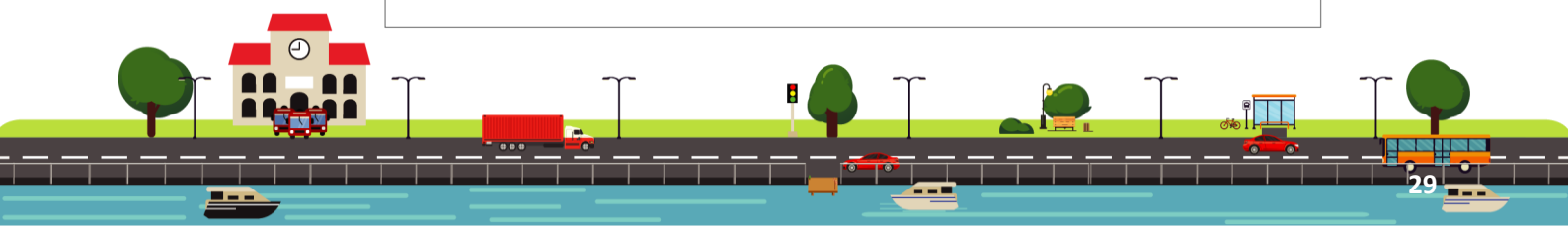
II.2.1.3 IKK 3. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi sedangkan, terminal barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani angkutan barang di jalan.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 2 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2.** Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- PM 132 Tahun 2015 menyebutkan bahwa terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada tahun 2023 di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dua terminal yaitu :

➤ Terminal Tipe – A Rajabasa

Operasional Terminal Tipe-A Rajabasa memiliki jumlah trayek sebanyak 8 trayek untuk AKDP dan sebanyak 19 untuk AKAP.

Untuk akumulasi volume **kedatangan bus** tahun 2024 Per Triwulan II adalah sebanyak 11.595 dengan rincian untuk kendaraan AKAP sebanyak 532 kendaraan dan untuk kendaraan AKDP sebanyak 11.015 kendaraan.

Untuk perbulannya rata – rata kedatangan kendaraan AKAP adalah sebanyak 88 kendaraan, sedangkan bagi kedatangan kendaraan AKDP adalah sebanyak 1932 kendaraan.

Akumulasi volume **keberangkatan bus** Tahun 2024 Per Triwulan II adalah sebanyak 14.117 dengan rincian untuk kendaraan AKAP sebanyak 1.066 kendaraan dan untuk kendaraan AKDP sebanyak 13.051 kendaraan. Untuk perbulannya rata – rata keberangkatan kendaraan AKAP adalah sebanyak 177 Kendaraan sedangkan bagi keberangkatan kendaraan AKDP adalah sebanyak 2.175 kendaraan.

Jumlah **penumpang AKAP Kedatangan** Tahun 2024 Per Triwulan II sebanyak 11.443 orang dan rata- rata perbulannya sebanyak 1.907 Orang. Sedangkan jumlah **penumpang AKAP Keberangkatan** Tahun 2024 sebanyak 24.237 orang dan rata- rata perbulannya sebanyak 4.039 Orang.

Jumlah **penumpang AKDP Kedatangan** Tahun 2024 Per Triwulan II sebanyak 69.622 orang dan rata- rata perbulannya sebanyak



11.603 Orang. Sedangkan jumlah **penumpang AKDP Keberangkatan** Tahun 2023 sebanyak 90.239 orang dan rata- rata perbulannya sebanyak 15.039 Orang.

➤ Terminal Tipe – A Betan Subing

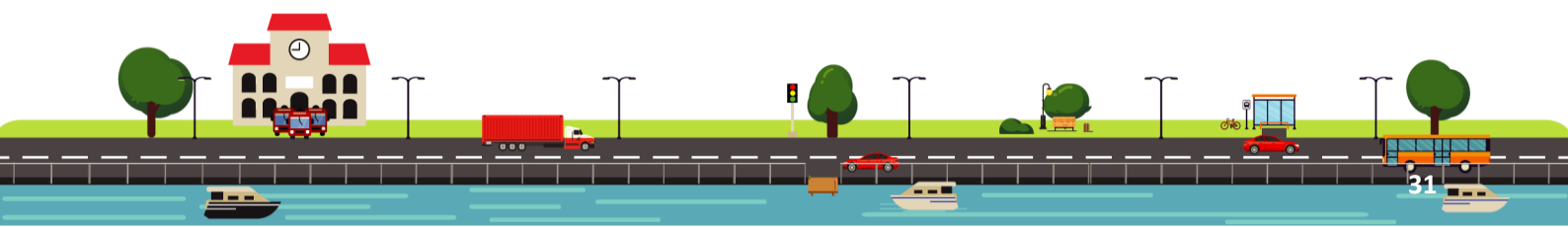
Operasional Terminal Tipe-A Betan Subing anggaran sudah ada dalam DIPA/POK tetapi belum beroperasi masih dalam tahap perencanaan Revitalisasi dan Operasional.

- Faktor Keberhasilan:
 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Terminal sesuai ketentuan atau undang-undang yang berlaku
 2. Terpenuhinya Fasilitas Pendukung Pelayanan Terminal
 3. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang Cakap, Handal dan Sinergitas
- Faktor Kegagalan:
 1. Tidak Layak Sarana dan Prasarana Terminal sehingga pelayanan kurang maksimal
 2. Minimnya Fasilitas Pendukung di Terminal
 3. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk menghitung Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang di Rencanakan Beroperasi}}$$

- Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$



- Adapun Pagu Anggaran terkait capaian Indikator Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 yaitu senilai Rp. 2,782,179,000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 740.606.331,- atau mencapai 26,62% dan Nomor Nomenklatur 4638.CDP.040.051

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Mengusulkan ke depannya untuk mengoperasikan seluruh terminal yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Lampung demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan fasilitas prasarana transportasi umum yang lebih baik dan nyaman
- Menyediakan ruang tunggu dan tempat makan yang lebih baik bagi penumpang melalui usulan kegiatan di tahun – tahun berikutnya
- Menyediakan ruang parkir bagi kendaraan penumpang untuk mendukung sistem Transit Oriented Development (TOD)
- Melakukan Monitoring Terminal Tipe-A sesuai dengan jadwal yang telah disusun

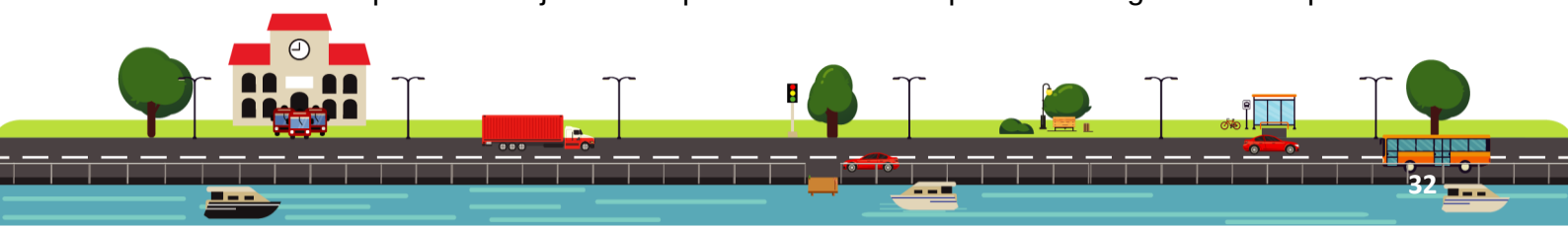
II.2.1.6 IKK 6. Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

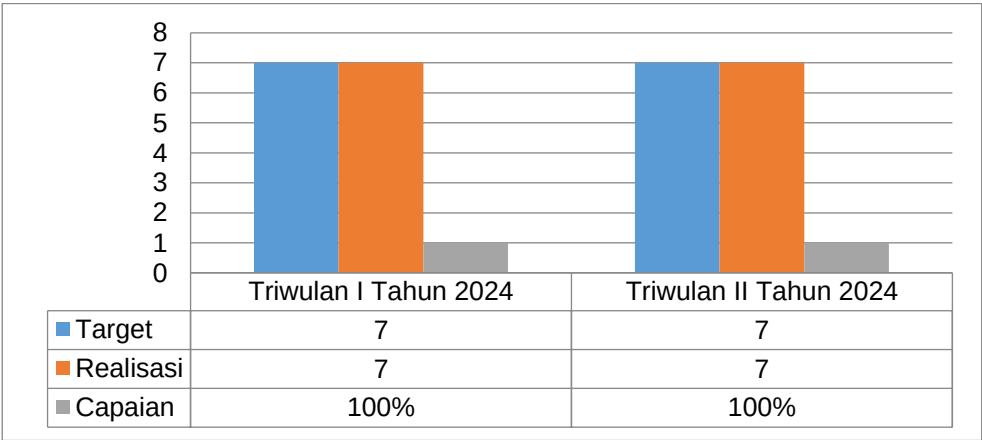
Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyebrangan. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyebrangan kelas I, II, III. Sedangkan pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpulan dan pengumpan.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 7 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 7 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada



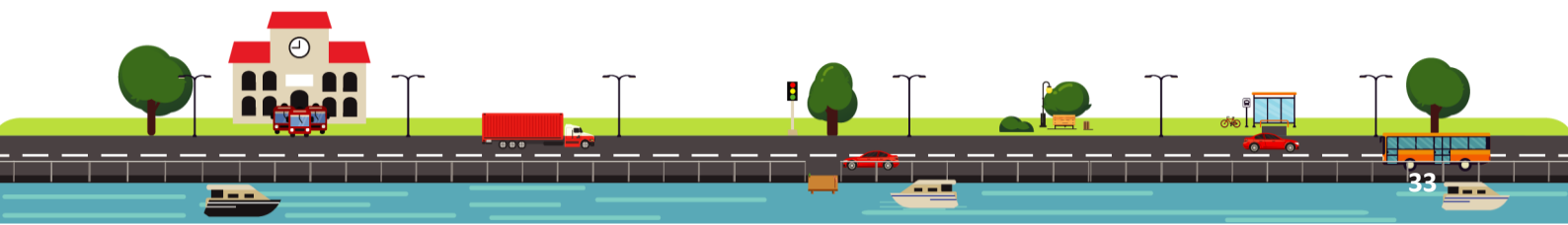
Gambar II.3. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Yang Beroperasi.



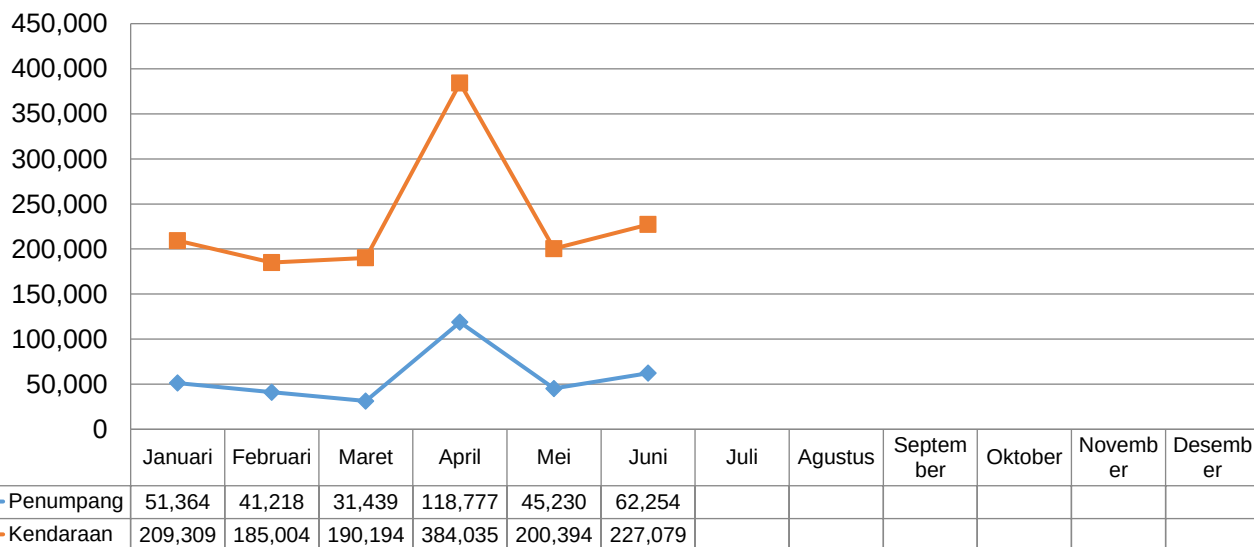
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada tahun 2024 di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dua pelabuhan yaitu :
 - Pelabuhan Penyebrangan BakauheniOperasional Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni melayani rute Merak – Bakauheni dengan jumlah kapal yaitu 74 kapal. Pada tahun 2024 Pelabuhan Bakauheni melayani 9.1154 trip, total penumpang 124.021 orang dan jumlah kendaraan 584.507 unit Kendaraan.

Gambar II.4. Grafik Data Produksi Pelabuhan Bakauheni



DATA PRODUKSI SISI BAKAUHENI TAHUN 2024



➤ **Pelabuhan Sungai Wiralaga**

Operasional Pelabuhan Sungai Wiralaga anggaran sudah ada dalam Dipa/POK tetapi belum beroperasi masih dalam tahap perencanaan Revitalisasi dan Operasional.

➤ **Operasional Pelabuhan Penyeberangan KTM Sp. 8 (PEMDA)**

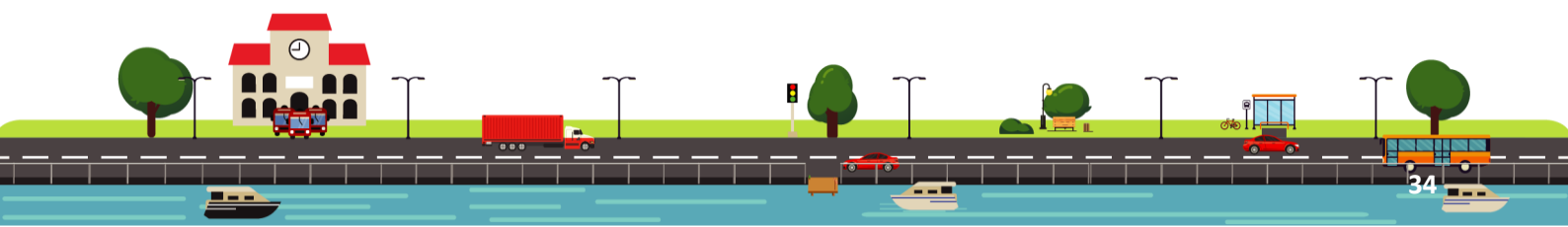
Operasional Pelabuhan Penyeberangan KTM Sp. 8 (PEMDA) anggaran sudah ada dalam Dipa/POK tetapi belum beroperasi masih dalam tahap perencanaan Revitalisasi dan Operasional.

➤ **Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kuala Teladas (PEMDA)**

Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kuala Teladas (PEMDA) belum beroperasi masih dalam tahap perencanaan Revitalisasi dan Operasional

➤ **Operasional Pelabuhan Danau Lumbok**

Operasional Pelabuhan Danau Lumbok anggaran sudah ada dalam Dipa/POK tetapi belum beroperasi masih dalam tahap perencanaan Revitalisasi dan Operasional.



➤ **Operasional Pelabuhan Heniarong**

Operasional Pelabuhan Heniarong anggaran sudah ada dalam DIPA/POK tetapi belum beroperasi masih dalam tahap perencanaan Revitalisasi dan Operasional

➤ **Operasional Pelabuhan Danau Ranau**

Operasional Pelabuhan Danau Ranau anggaran sudah ada dalam DIPA/POK tetapi belum beroperasi masih dalam tahap perencanaan Revitalisasi dan Operasional

• Factor keberhasilan :

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelabuhan sesuai ketentuan atau undang-undang yang berlaku
2. Terpenuhinya Fasilitas Pendukung Pelayanan Pelabuhan
3. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang Cakap, Handal dan Sinergitas

• Faktor Kegagalan:

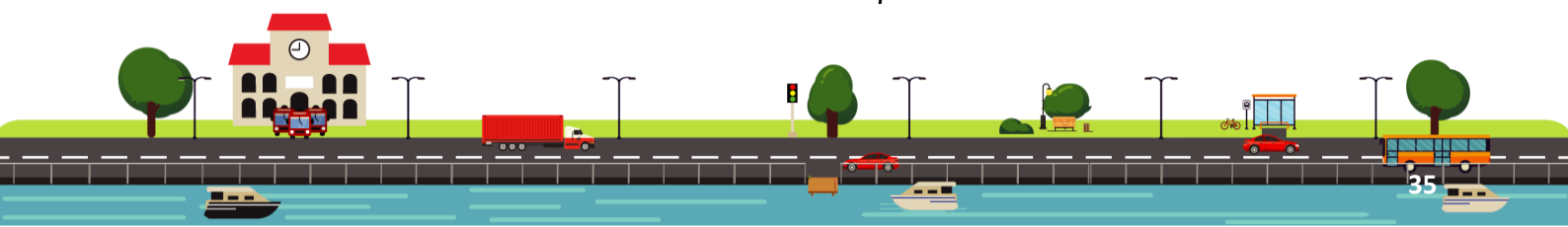
1. Tidak Layak Sarana dan Prasarana Pelabuhan sehingga pelayanan kurang maksimal
2. Minimnya Fasilitas Pendukung di Pelabuhan
3. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Untuk menghitung Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang direncanakan untuk Beroperasi}}$$

- Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$



- Adapun anggaran terkait capaian Indikator Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.362.760.000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 765,361,000.00,- atau mencapai 56,16% dan nomor nomenkelatur 4638.CDP.040.051

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Mengusulkan ke depannya untuk mengoperasikan seluruh pelabuhan dan dermaga yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Lampung demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan fasilitas prasarana transportasi umum yang lebih baik dan nyaman
- Menyediakan ruang tunggu dan tempat makan yang lebih baik bagi penumpang melalui usulan kegiatan di tahun – tahun berikutnya
- Menyediakan ruang parkir bagi kendaraan penumpang untuk mendukung sistem Transit Oriented Development (TOD)
- Melakukan Monitoring Pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun

II.2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kinerja (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A.
2. IKK 2. Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A.
3. IKK 3. Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

II.2.2.3 IKK2.3 Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

Capaian kinerja Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan



Untuk menghitung Indikator Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

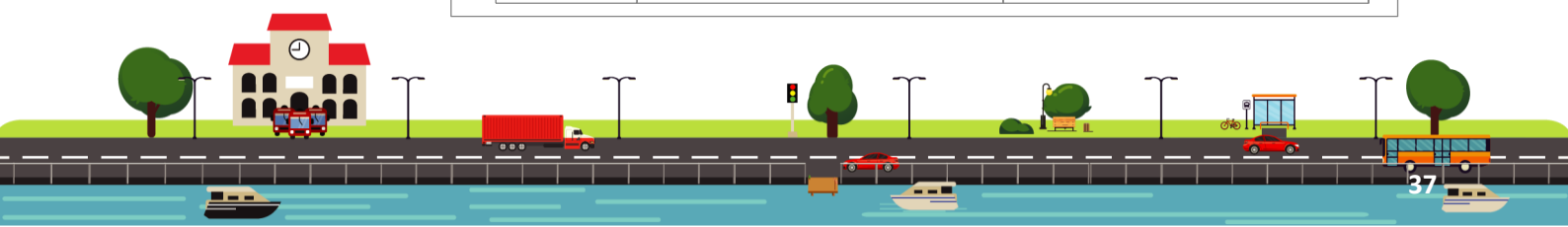
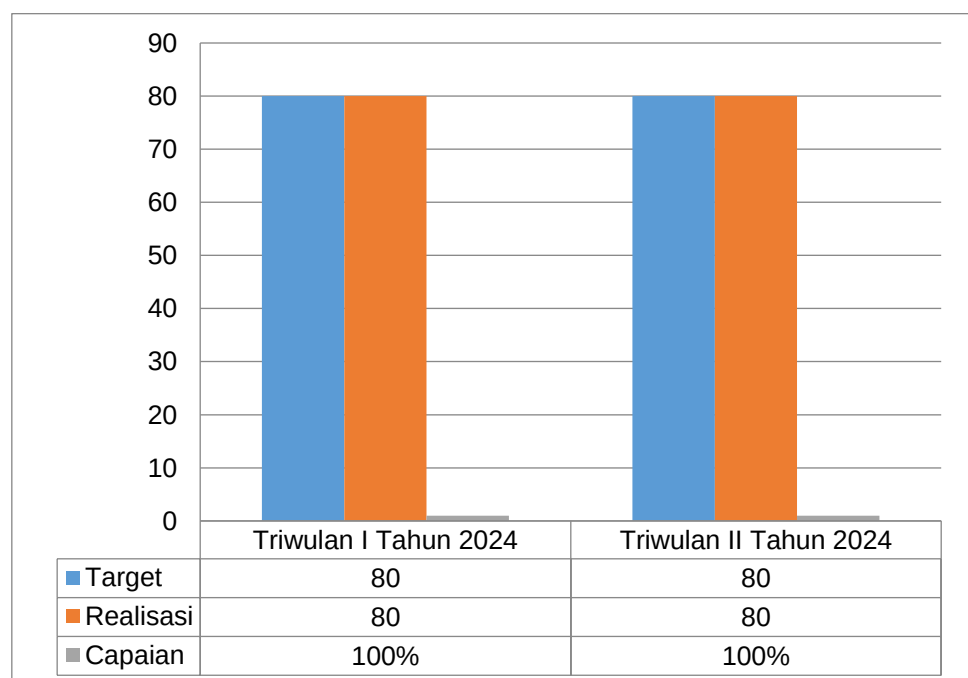
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

Untuk menghitung Indikator Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 sebesar 80 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada tahun 2023 di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung. Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP untuk jumlah dokumen hasil pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal angkutan SDP mencapai 80 % . Kegiatan dilaksanakan bersama dengan Direktorat TSDP dan BPTD Banten. Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan mencapai 100%

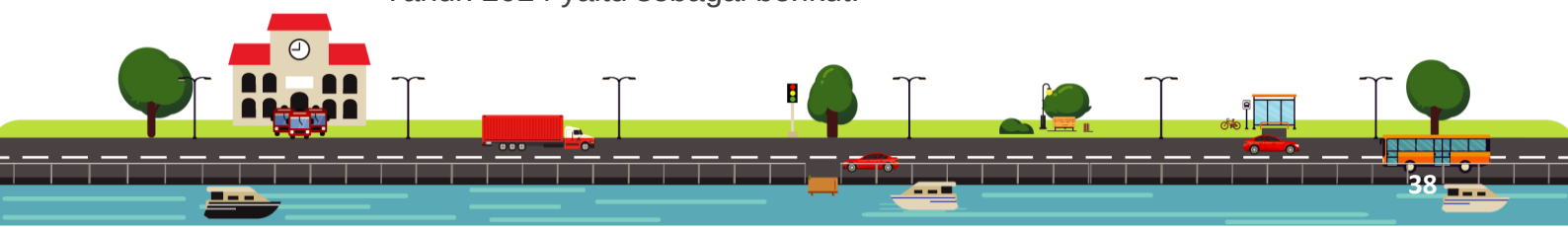
- Untuk menghitung Indikator Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

- Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

- Faktor Keberhasilan:
 1. Terpenuhinya Jumlah Kapal yang diperiksa sesuai standar
 2. Teralisasinya Anggaran Sesuai Jadwal
 3. Sumber daya manusia yang berkopeten
- Factor kegagalan
 1. Tidak Terpenuhinya Jumlah Kapal yang diperiksa sesuai standar
 2. Tidak Teralisasinya Anggaran Sesuai Jadwal
 3. Kurangnya Sumber daya manusia yang berkopeten
- Adapun anggaran terkait capaian Indikator Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:



Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 146,920,257,- atau mencapai 48,6% dan nomor nomenklatur 4640.FAE.923.923.D

a .4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

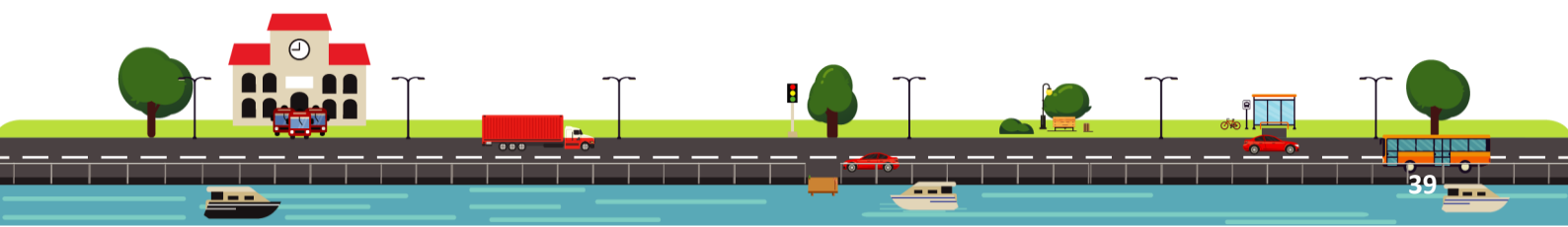
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional pelabuhan SDP
- Memberikan reward dan punishment terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum
- Melakukan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sesuai dengan jadwal yang telah disusun

II.2.3 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kinerja (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
2. IKK 5. Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
3. IKK 7. Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



II.2.3.1 IKK3.1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka putih;
2. Marka Kuning;
3. Paku Jalan ;
4. Rambu Lalu Lintas;
5. Rambu Chevron;
6. Rambu Tiang F;
7. RPPJ;
8. Patok Tikungan;
9. APJ Surya;
10. Warning Light;
11. Guard rail;

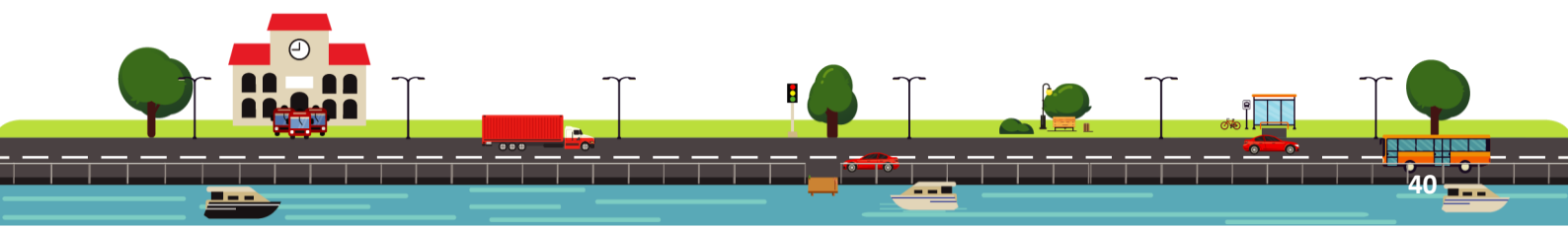
Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.

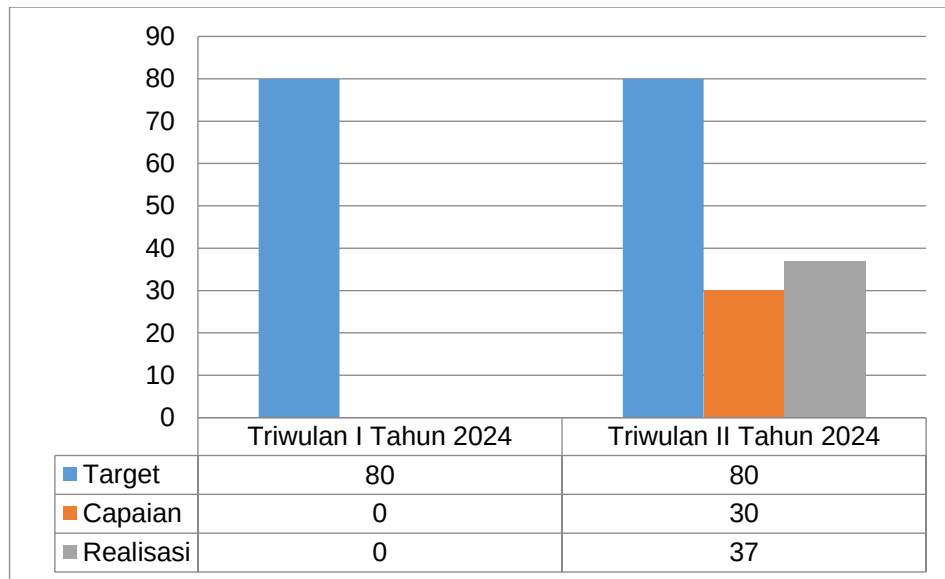
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2024

Capaian kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 sebesar 80 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6.** Grafik Capaian IKK Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.



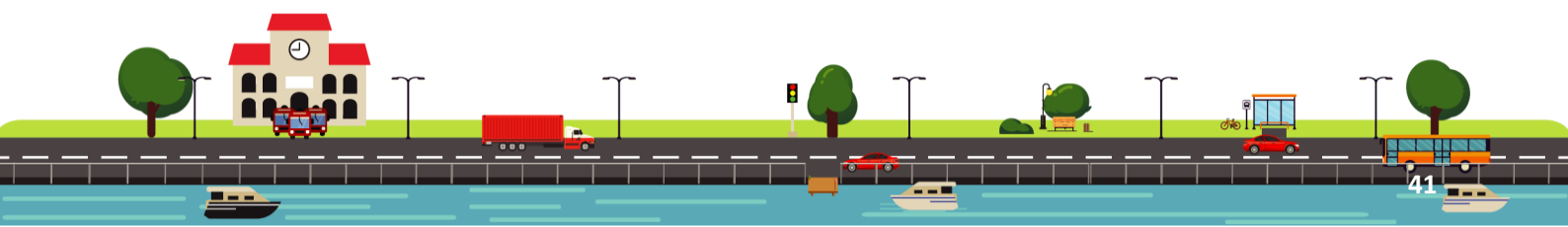


a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Jumlah Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada tahun 2024 di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dilaksanakan kegiatan dengan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan yaitu :

Pengadaan Perlengkapan Jalan dilaksanakan :

1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan UK 75x75 cm (Ruas 003, 004, 019, 020, 037, 038,048,049,036)
2. Pengadaan dan pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jur 120x240c, (Ruas 048, 049, 038,037,019,004,020)
3. Pengadaan dan pemasangan Rambu Chevron 90x75cm (Ruas 024, 028, 036, 003,003,004,019,020,037,038,048,049)
4. Pengadaan dan pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Siku (Ruas 048,049,019,020,037)
5. Pengadaan dan Pemasangan APILL (7 Lokasi)
6. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 3x120mm (Thermoplastic Putih) (Ruas 024,028,036,003,004,019,020, 037,038,048 049)
7. Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi (Ruas 003,004,019,020,037,038,048,049,024,028,036)
8. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (Ruas 028,036,048,049,024,003,004,019,020,037,038)



Pengadaan Perlengkapan Jalan pada setiap ruas terdiri dari beberapa fasilitas keselamatan jalan yaitu :

No.	Faskes	Jumlah
1.	Rambu Lalu Lintas UK 75cm x 75cm	665 BUAH
3.	Rambu Pendahulu Penunjuk Jur	22 UNIT
4.	Rambu Chevron	1360 UNIT
5.	Lampu Peringatan Tenaga Surya	10 UNIT
6.	APILL	7 Paket
7.	Marka jalan Thermoplastic	144.027 M
8.	Patok Tikungan Pipa Besi	2.264 Buah
9.	Paku Jalan Bulat	10.000 Buah

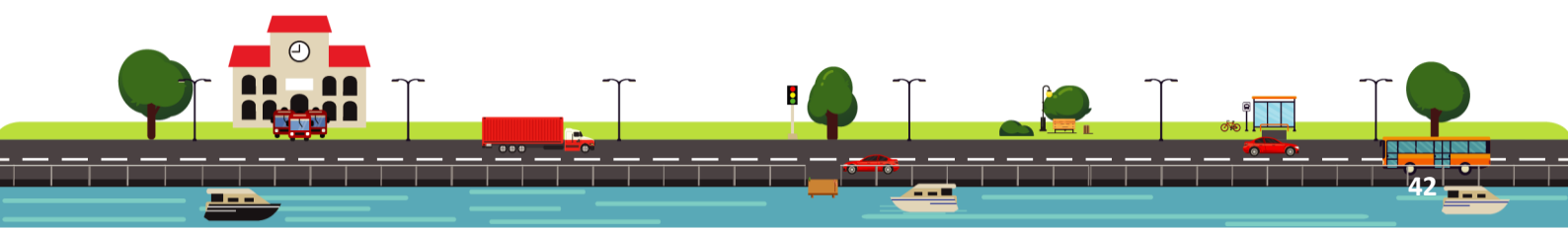
- Untuk menghitung Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang terhadap kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang kondisi ideal}}{\text{Persentase Rencana Perlengkapan Jalan Yang akan dipasang kondisi ideal}} \times 100\%$$

- Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{30}{80} \times 100\% = 37,5\%$$

- Faktor Keberhasilan:
 1. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Nasional
 2. Mengadakan survey pada titik lokasi pemasangan fasilitas keselamatan jalan
 3. Capaian progress Anggaran sesuai jadwal



- Faktor kegagalan :
 1. Tidak tersedianya fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Nasional
 2. Tidak capaian progress Anggaran sesuai jadwal
 3. Tidak capaian progress kegiatan sesuai jadwal
- Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang kondisi ideal sebesar Rp. 32.743.994.000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 21.797.482.000,- atau mencapai 65,6% dan Nomor nomenklatur 4639.RAC.053.051, 4639.RAC.053.052, 4639.RAC.053.053,

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

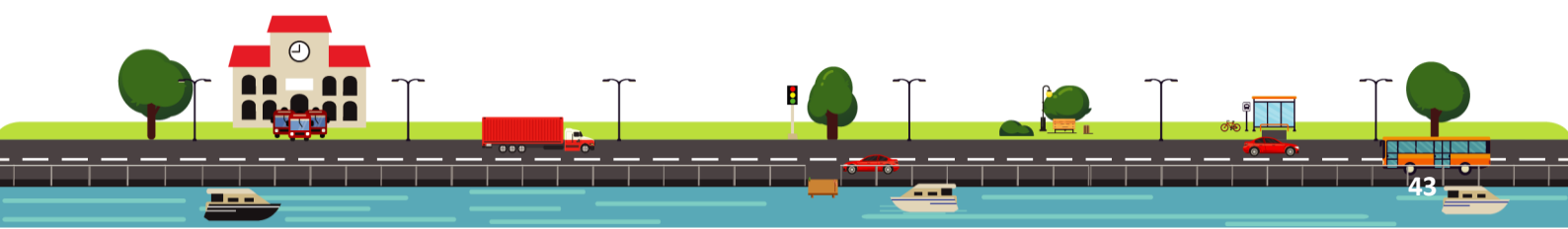
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pemasangan perlengkapan jalan
- Melakukan survei terkait titik – titik pemasangan baru perlengkapan jalan
- Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain terkait perlengkapan jalan

II.2.3.5 IKK3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Sosialisasi Keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasa, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD.

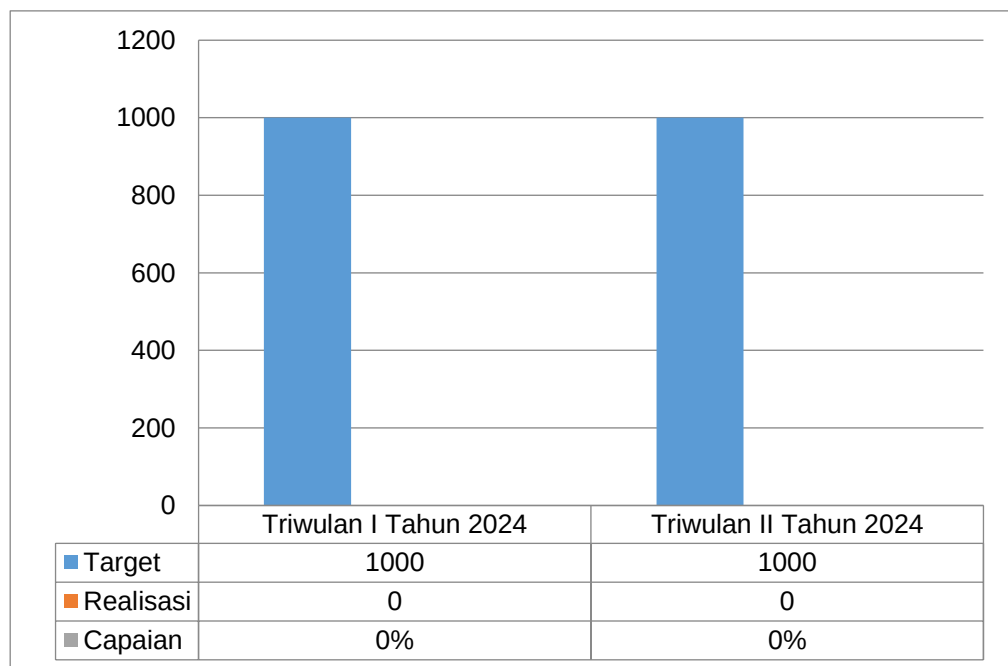


a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD.

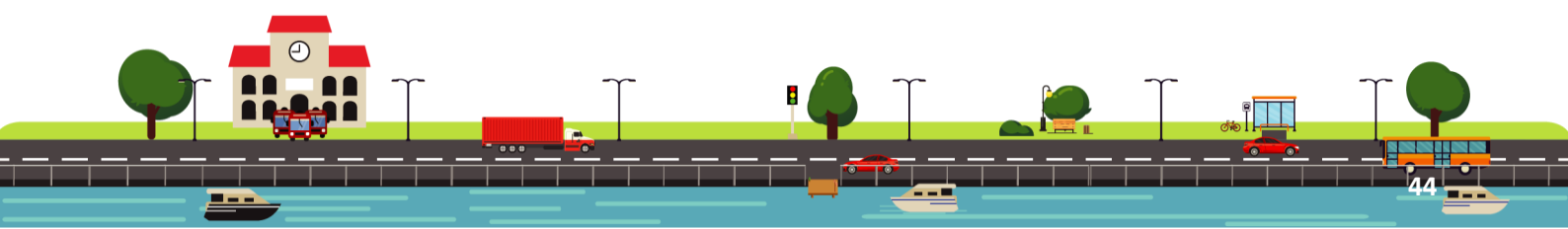
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2024

Capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 1000 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.



a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- PP 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Sosialisai Keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan



kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.

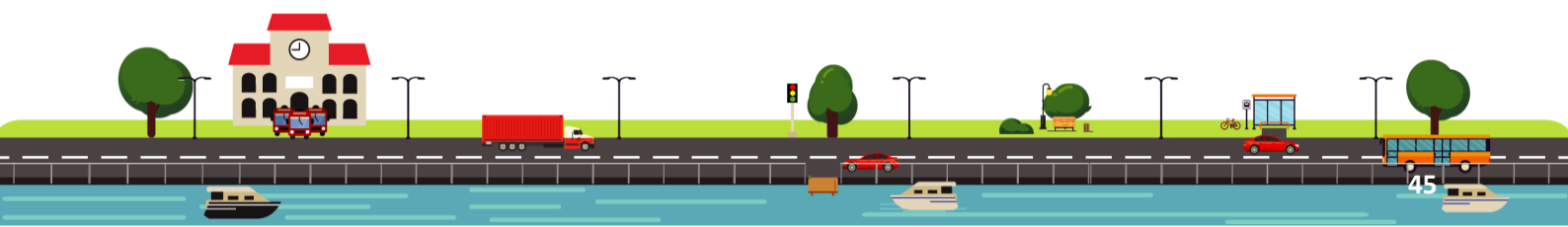
Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD.

- Faktor keberhasilan :
 1. Tercapainya target sosialisasi terhadap masyarakat akan kesadaran berlalu lintas
 2. Tersosialisasinya persyaratan keselamatan dalam berkendara di jalan masyarakat akan berlalu lintas yang baik dan benar
 3. Mengetahui dampak lalu lintas terhadap sector pelaku usaha
- Faktor kegagalan :
 1. Minimnya pengetahuan masyarakat akan keselamatan berlalu lintas yang baik dan benar
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan yang baik dan benar
 3. Tidak mengetahui dampak lalu lintas terhadap sector pelaku usaha
- Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan}}{\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan}}$$

- keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan}}{\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan}} = 0$$



- Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi Tahun 2024 yaitu senilai Rp.350.000.000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 0,- atau mencapai 0% dan Nomor Nomenklatur : 4639.PEH.049.051

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

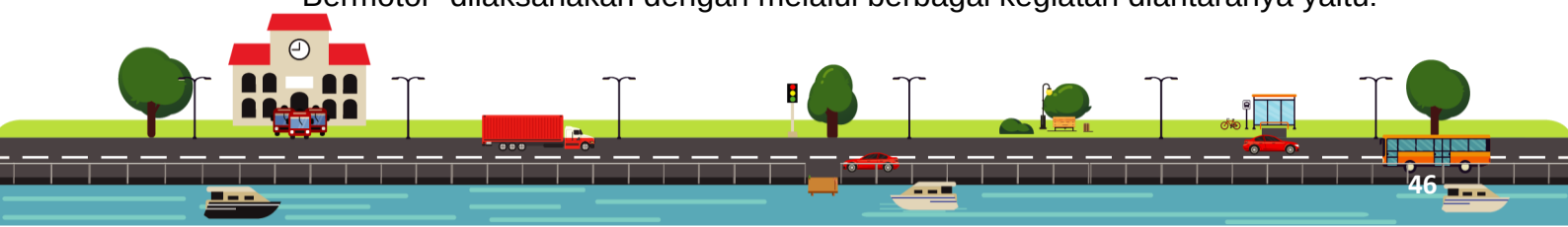
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan dan penyeberangan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan dan penyeberangan;
- Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik;
- Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat.

II.2.3.7 IKK7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Presentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah Indonesia dan jumlah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Capaian kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu:



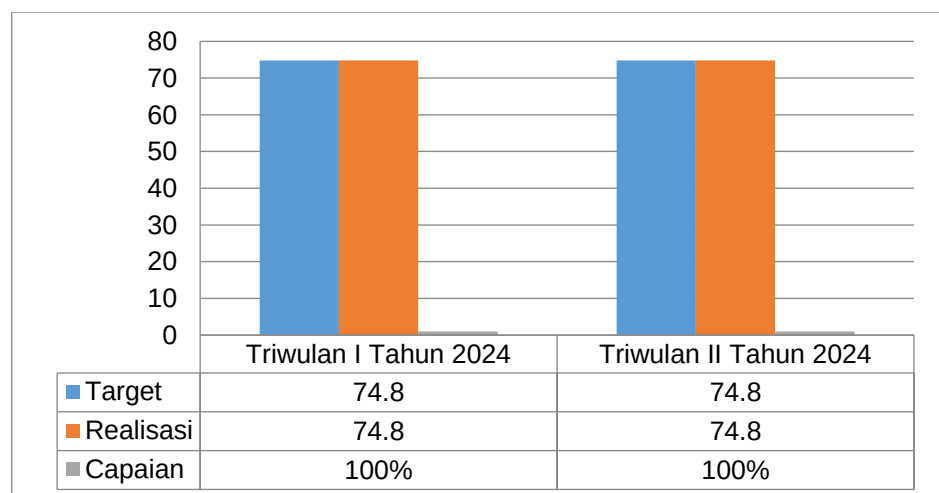
1) monitoring Evaluasi dan Akreditasi UPPKB 2) Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Prasarana Transportasi Jalan 3) Pengawasan Pembinaan dan Pemeriksaan Rancang Bangun di Perusahaan Karoseri 4) Kalibrasi Peralatan PKB 5) Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu: 1) monitoring Evaluasi dan Akreditasi UPPKB 2) Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Prasarana Transportasi Jalan 3) Pengawasan Pembinaan dan Pemeriksaan Rancang Bangun di Perusahaan Karoseri 4) Kalibrasi Peralatan PKB 5) Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

a.2 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2024

Capaian Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar 74,8 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 74,8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Grafik Capaian IKK Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .



a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 5370/KP.108/DRJD/20217 tentang Kompetensi petugas unit



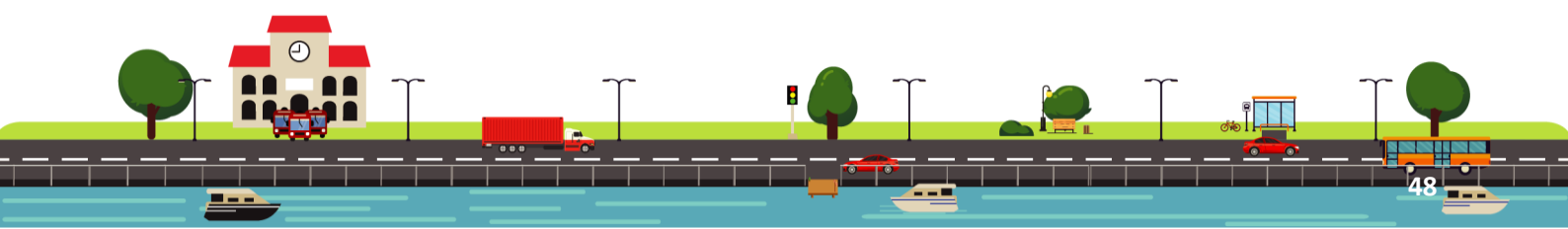
pelaksana Penimbangan Kendaraan Kendaraan Bermotor. Capaian kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu: 1) monitoring Evaluasi dan Akreditasi UPPKB 2) Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Prasarana Transportasi Jalan 3) Pengawasan Pembinaan dan Pemeriksaan Rancang Bangun di Perusahaan Karoseri 4) Kalibrasi Peralatan PKB 5) Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Semua kegiatan berjalan dan mencapai kinerja 100%

- Faktor Keberhasilan:
 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana UPPKB sesuai ketentuan atau undang-undang yang berlaku
 2. Terpenuhinya Fasilitas Pendukung Pelayanan UPPKB
 3. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang Cakap, Handal dan Sinergitas
- Faktor Kegagalan:
 1. Tidak Layak Sarana dan Prasarana Terminal sehingga pelayanan dalam pengujian kurang maksimal
 2. Minimnya Fasilitas Pendukung di UPPKB
 3. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Cakap, Handal dan Sinergitas
- Untuk menghitung Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

- Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{74,8}{74,8} \times 100\% = 100\%$$



- Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 yaitu senilai Rp. 3,121,029,000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 1,503,510,990,- atau mencapai 48.38% dan Nomor nomenklatur 4639.CDP.077.052 dan 4639.CAC.059.051

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Mengusulkan SDM penguji yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan
- Melaksanakan perawatan alat kalibrasi
- Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor

III.2.4 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 1 (Satu) Indikator Kinerja Kinerja (IKK) yaitu:

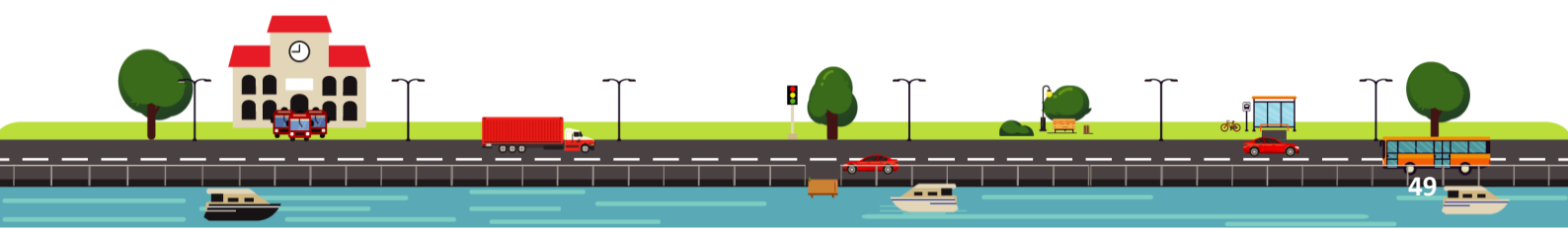
1. IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

III.2.4.1 IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a. Aspek Perencanaan;
- b. Aspek Kepegawaian (SDM);
- c. Aspek Keuangan;
- d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja(PK), penginputan aplikasi e-performance.



Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2024



a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM.189 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata cara kerja Kementerian Perhubungan. Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu: 1) Monitoring Daerah Rawan Kecelakaan Provinsi Lampung, 2) Pengawasan dan Penegakan Hukum 3) Survei LHR Jalan Nasional dan Jalan Tol.

Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah dilaksanakan sebanyak 910 berkas, membentuk forum LLAJ untuk peningkatan kinerja dan keselamatan LLAJ di 11 Kab/Kota di Provinsi Lampung.

- Factor keberhasilan :
 1. Terselenggaranya kegiatan penunjang teknis
 2. Terealisasi Anggaran pada kegiatan Penunjang teknis tercapai
 3. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkopeten
- Factor kegagalan :
 1. Tidak tercapainya target kegiatan penunjang teknis
 2. Tidak Terealisasi Anggaran pada kegiatan Penunjang teknis
 3. Minimnya Sumber Daya Manusia yang berkopeten



- Untuk menghitung Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat rumus sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{\text{Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat}}{\text{Target Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat}} \times 100\%$$

- Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

- Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 yaitu senilai Rp. 20,849,216,000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 6,358,337,341,- atau mencapai 30.28% dan nomor nomenklatur 4640.FAE.923.923 dan 4638.RBP.193.051

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

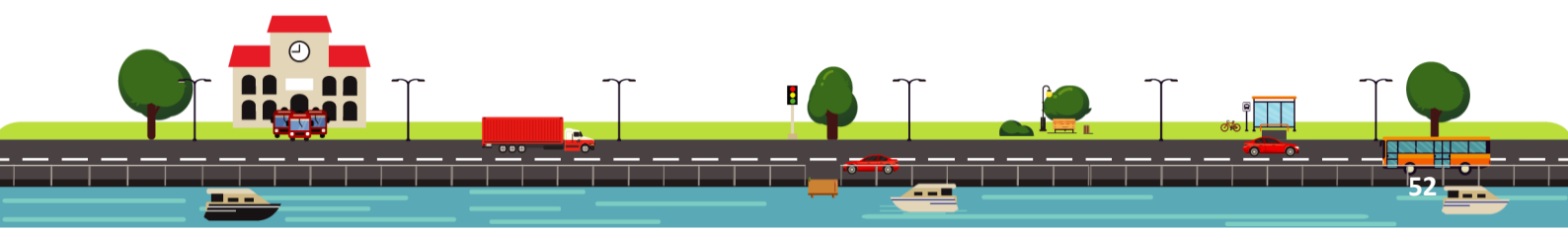
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terhadap tupoksi penyelenggaraan transportasi darat
- Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan transportasi darat kepada seluruh pegawai

II.2.5 Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (Satu) Indikator Kinerja Kinerja (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat



II.2.5.1 IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Penyelenggaraan perkantoran ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantorn sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima. Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu:

- 1) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD
- 2) Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Kelas II Lampung
- 3) Perencanaan dan Evaluasi Program Kerja Ditjen
- 4) Optimalisasi Informasi Dokumentasi dan Kehumasan
- 5) Peningkatan dan Pengelolaan Tata dan Sistem Informasi BPTD
- 6) Rekonsiliasi BMN dan Aset Kegiatan PNBPN
- 7) Kegiatan Pelaporan Data dan Kinerja Ditjen Hubdat
- 8) Evaluasi Pelaporan Kinerja atau Anggaran Berbasis E-Rekon
- 9) Rekonsiliasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi
- 10) Operasional Pemeliharaan Kantor
- 11) Gaji dan Tunjangan
- 12) Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Nataru.

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

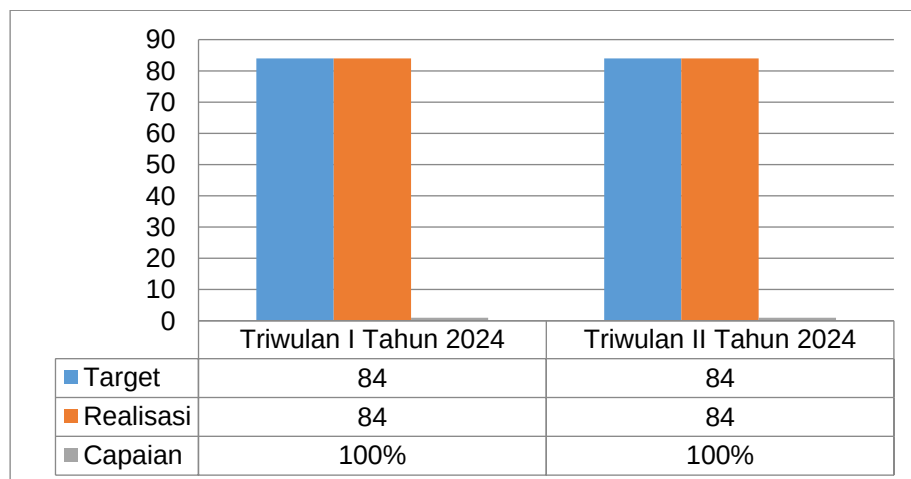
PP nomor 16 tahun 2021 tentang pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi. Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu: 1) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD 2) Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wil VI 3) Perencanaan dan Evaluasi Program Kerja Ditjen 4) Optimalisasi Informasi Dokumentasi dan Kehumasan 5) Peningkatan dan Pengelolaan



ata dan Sistem Informasi BPTD 6) Rekonsiliasi BMN dan Aset 6) Kegiatan PNPB 7) Kegiatan Pelaporan Data dan Kinerja Ditjen Hubdat 8) Evaluasi Pelaporan Kinerja atau Anggaran Berbasis E-Rekon 8) Rekonsiliasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 9) Operasional Pemeliharaan Kantor 10) Gaji dan Tunjangan 11) Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Nataru.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2023

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 84 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 84 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.10**. Grafik Capaian IKK kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.



a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- PP nomor 16 tahun 2021 tentang pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi.
- Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu: 1) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD 2) Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Kelas II Lampung 3) Perencanaan dan Evaluasi Program Kerja Ditjen 4) Optimalisasi Informasi Dokumentasi dan Kehumasan 5) Peningkatan dan Pengelolaan ata dan Sistem Informasi BPTD 6) Rekonsiliasi BMN dan



Aset 6) Kegiatan PNB 7) Kegiatan Pelaporan Data dan Kinerja Ditjen Hubdat 8) Evaluasi Pelaporan Kinerja atau Anggaran Berbasis E-Rekon 8) Rekonsiliasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 9) Operasional Pemeliharaan Kantor 10) Gaji dan Tunjangan 11) Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Nataru.

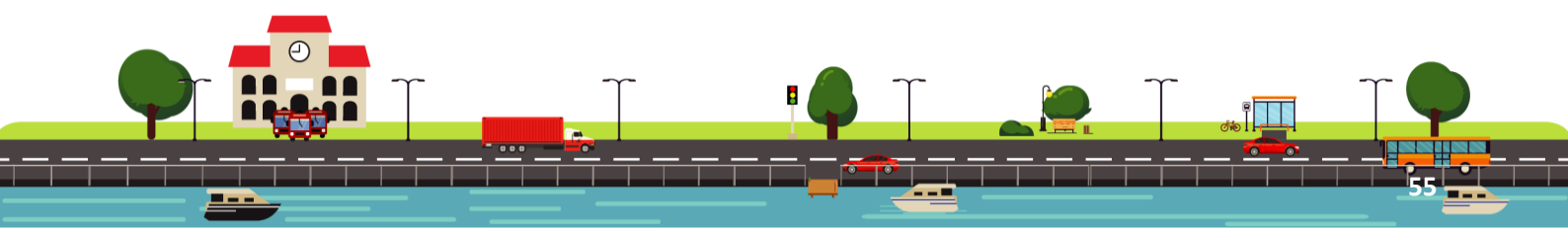
- Factor keberhasilan :
 1. Tersedianya sarana dan Prasarana kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan
 2. Tercapainya Revormasi birokrasi dalam pelayanan perkantoran
 3. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkopeten
- Factor kegagalan :
 1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten
 3. Tidak tercapainya realisasi anggaran sesuai Target
- Untuk menghitung Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat rumus sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{\text{Persentase Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat}}{\text{Target Persentase Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat}} \times 100\%$$

- Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{84}{84} \times 100\% = 100\%$$

- Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 yaitu dengan pagu senilai Rp. 35.321.070.000,- dengan realisasi Tahun 2024 Rp. 23,005,415,780,- atau mencapai 65,71% dan nomor nomenklatur 4671.EBA.994.001 dan 4670.EBA.994.002.



a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan sosialisai terkait pelayanan perkantoran, administrasi dan surat menyurat
- Mengusulkan SDM yang sesuai dengan kompetensi penyelenggaraan perkantora
- Memberikan penghargaan kepada seksi atau subbag yang administrasi penyelenggaraan perkantorannya baik dan rapih

II.3 REALISASI ANGGARAN

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

- **Pagu Anggaran**

Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 121.428.966.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp.	97.873.566.000	80,4%
PNBP	Rp.	8.555.400.000	7,1%
SBSN	Rp.	15.000.000.000	12,5%
Total	Rp.	121.428.966.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

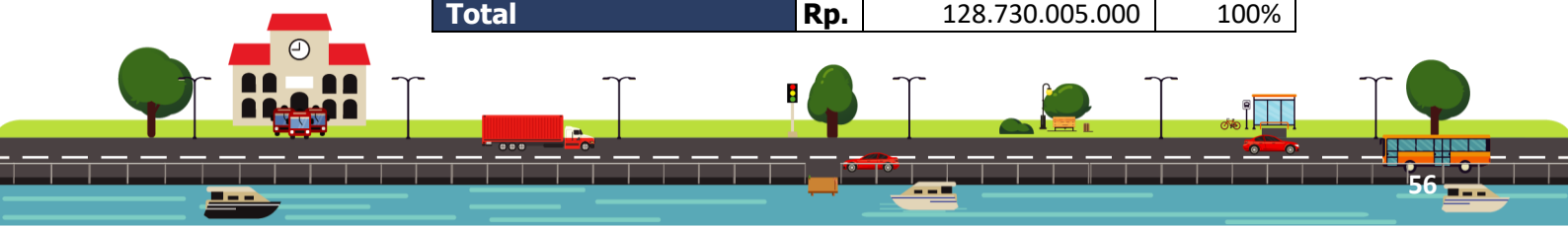
Tabel II.3 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp.	22.423.991.000	18,46%
Belanja Barang	Rp.	46.704.060.000	38,46%
Belanja Modal	Rp.	52.300.915.000	43,07%
Total	Rp.	121.428.966.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

Tabel II.4 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan II TA. 2024

RM	Rp.	103.332.235.000	80,4%
NBP	Rp.	8.555.400.000	6,6%
SBSN	Rp.	16.842.370.000	13%
Total	Rp.	128.730.005.000	100%



Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

Tabel II.5 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan II TA. 2024

Belanja Pegawai	Rp.	27.882.660.000	18,46%
Belanja Barang	Rp.	46.704.060.000	38,46%
Belanja Modal	Rp.	54.143.285.000	43,07%
Total	Rp.	128.730.005.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Revisi DIPA 01 Tanggal 11 Januari 2024
2. Revisi DIPA 02 Tanggal 31 Januari 2024
3. Revisi DIPA 03 Tanggal 19 Februari 2024
4. Revisi DIPA 04 Tanggal 18 Maret 2024
5. Revisi DIPA 05 Tanggal 22 April 2024
6. Revisi DIPA 06 Tanggal 30 Mei 2024
7. Revisi DIPA 07 Tanggal 21 Juni 2024

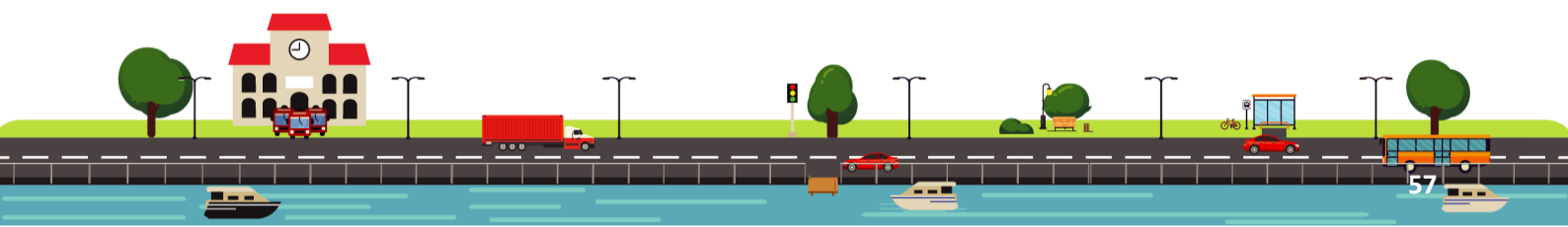
III.3.1.2. Refocussing Anggaran Tahun 2024

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2024 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perubahan total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.6 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2024

URAIAN	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	97.873.566.000	8.555.400.000	15.000.000.000	121.428.966.000
Revisi Ke I	97.873.566.000	8.555.400.000	15.000.000.000	121.428.966.000
Revisi Ke II	97.873.566.000	8.555.400.000	15.000.000.000	121.428.966.000
Revisi Ke III	97.873.566.000	8.555.400.000	15.000.000.000	121.428.966.000
Revisi Ke IV	97.873.566.000	8.555.400.000	15.000.000.000	121.428.966.000
Revisi Ke V	97.873.566.000	8.555.400.000	16.842.370.000	123.271.336.000
Revisi Ke VI	97.873.566.000	8.555.400.000	16.842.370.000	123.271.336.000
Revisi Ke VII	103.332.235.000	8.555.400.000	16.842.370.000	128.730.005.000

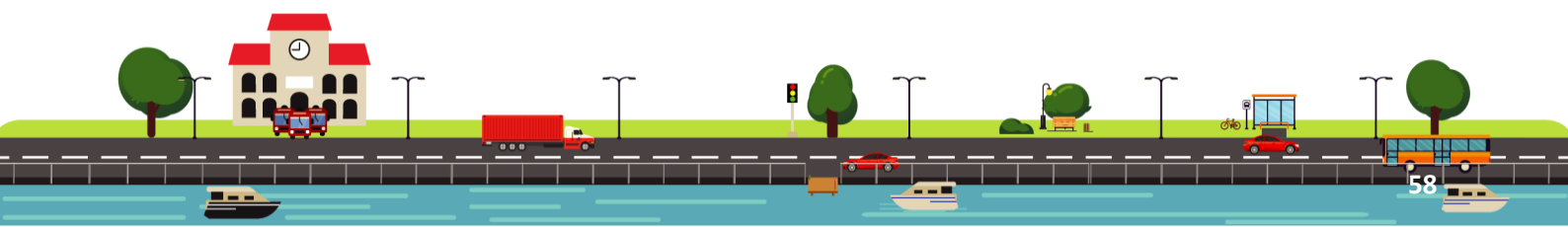
Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung



Tabel II.7 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2024

URAIAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
	Bel. Pegawai	Bel. Barang	Bel. Modal	
Pagu Awal	22.423.991.000	46.704.060.000	52.300.915.000	121.428.966.000
Revisi Ke I	22.423.991.000	46.704.060.000	52.300.915.000	121.428.966.000
Revisi Ke II	22.423.991.000	46.704.060.000	52.300.915.000	121.428.966.000
Revisi Ke III	22.423.991.000	46.704.060.000	52.300.915.000	121.428.966.000
Revisi Ke IV	22.423.991.000	46.704.060.000	52.300.915.000	121.428.966.000
Revisi Ke V	22.423.991.000	46.704.060.000	54.143.285.000	123.271.336.000
Revisi Ke VI	22.423.991.000	46.704.060.000	54.143.285.000	123.271.336.000
Revisi Ke VII	27.882.660.000	46.704.060.000	54.143.285.000	128.730.005.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung



Tabel II.8 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2024

JENIS BELANJA	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir
1. Bel. Pegawai	22.423.991.000	-	22.423.991.000	22.423.991.000	5.458.669.000	27.882.660.000
2. Bel. Barang	46.704.060.000	-	56.034.611.000	46.704.060.000	-	46.704.060.000
RM	46.148.660.000	-	46.148.660.000	46.148.660.000	-	46.148.660.000
PNBP	555.400.000	-	555.400.000	555.400.000	-	555.400.000
SBSN	-	-	-	-	-	-
3. Bel. Modal	52.300.915.000	-	40.259.458.000	52.300.915.000	1.842.370.000	54.143.285.000
RM	29.300.915.000	-	29.300.915.000	29.300.915.000	-	29.300.915.000
PNBP	8.000.000.000	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-	8.000.000.000
SBSN	15.000.000.000	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-	16.842.370.000
TOTAL	121.428.966.000	-	121.428.966.000	121.428.966.000	7.301.039.000	128.730.005.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.9 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024

Program / Kegiatan	PAGU AWAL	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
BPTD Kelas II LAMPUNG	121.428.966.000	121.428.966.000	37,625,915,251	30,99	128.730.005.000	68.652.573.653	53,33
Program Infrastruktur Konektivitas	91.566.565.000	91.566.565.000	24,991,525,043	27,21	93.408.935.000	45.647.157.873	48,87
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7,057,387,000	7,057,387,000	454,545,460	6,43	7.057.387.000	1.363.636.380	19,32
Pelayanan Transportasi Darat	26,144,939,000	26,144,939,000	10,152,759,801	38,82	27.987.309.000	14.183.226.693	50,68
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	37,215,023,000	37,215,023,000	13,018,349,332	34,96	37.215.023.000	23.595.037.202	63,4
Penunjang Teknis Transportasi Darat	21,149,216,000	21,149,216,000	1,365,870,450	6,45	21.149.216.000	6.505.257.598	30,76
Program Dukungan Manajemen	29,862,401,000	29,862,401,000	12,634,390,208	42,3	35.321.070.000	23.005.415.780	65,13
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi	7,438,410,000	7,438,410,000	2,891,766,845	38,86	7.438.410.000	4.742.482.687	63,76
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	22,423,991,000	22,423,991,000	9,742,623,363	43,44	27.882.660.000	18.262.933.093	65,5

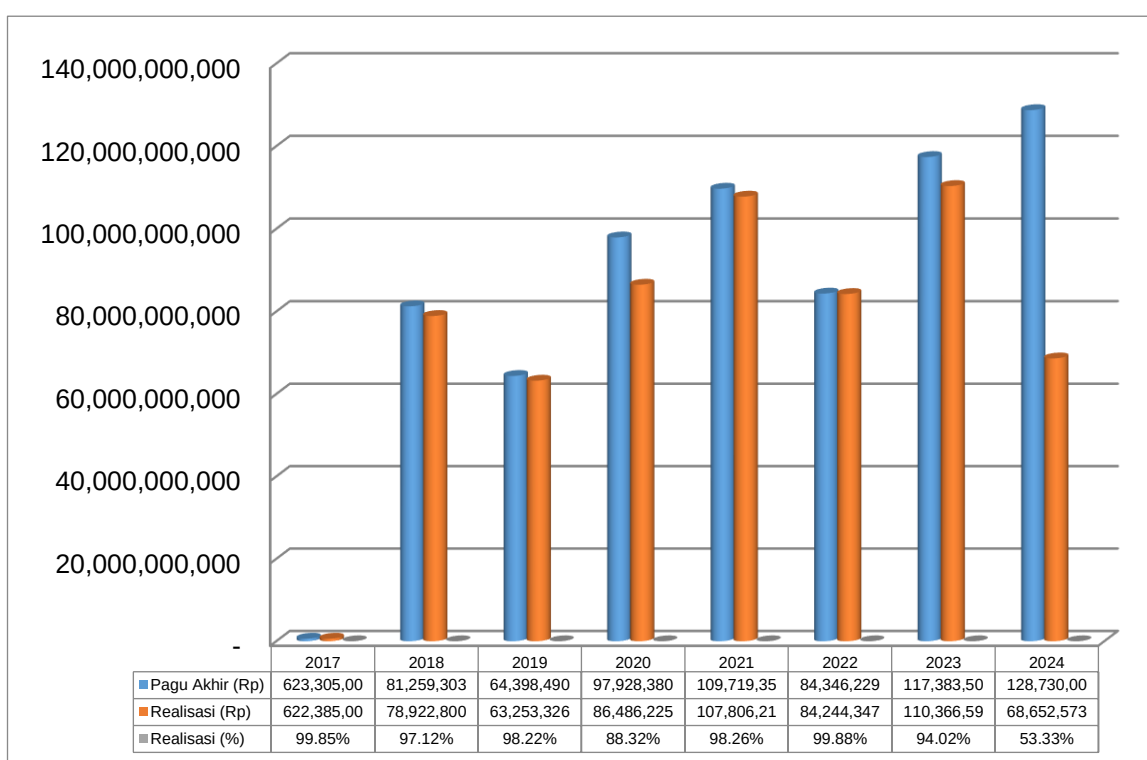
Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024

No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2017	623.305.000	623.305.000	622.385.000	99,85%
2	2018	66.646.441.000	81.259.303.000	78.922.800.092	97,12%
3	2019	66.161.957.000	64.398.490.000	63.253.326.198	98,22%
4	2020	95.435.124.000	87.928.380.001	86.486.225.722	98,36%
5	2021	135.385.144.000	109.719.359.000	107.806.214.490	98,26%
6	2022	99.752.485.000	84.346.229.000	84.244.347.470	99,88%
7	2023	118.718.060.000	117.383.501.000	110.366.595.571	94,02%
8	2024	121.428.966.000	128.730.005.000	68.652.573.653	53,33%



Gambar II.11 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran
Tahun 2017 – Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti terlihat pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 110.366.595.571,- atau mencapai 94,02% dari pagu akhir Rp. 117.383.501.000,- Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 128.730.005.000,- dengan realisasi per Triwulan II Rp 68.652.573.653,- atau 53,33 %

II.3.2 Realisasi Anggaran

II.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.11 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

Program / Kegiatan	PAGU AWAL	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
BPTD KELAS II LAMPUNG	121.428.966.000	121.428.966.000	37,625,915,251	30,99	128.730.005.000	68.652.573.653	53,33
Program Infrastruktur Konektivitas	91.566.565.000	91.566.565.000	24,991,525,043	27,21	93.408.935.000	45.647.157.873	48,87
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7,057,387,000	7,057,387,000	454,545,460	6,43	7.057.387.000	1.363.636.380	19,32
Pelayanan Transportasi Darat	26,144,939,000	26,144,939,000	10,152,759,801	38,82	27.987.309.000	14.183.226.693	50,68
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	37,215,023,000	37,215,023,000	13,018,349,332	34,96	37.215.023.000	23.595.037.202	63,4
Penunjang Teknis Transportasi Darat	21,149,216,000	21,149,216,000	1,365,870,450	6,45	21.149.216.000	6.505.257.598	30,76
Program Dukungan Manajemen	29,862,401,000	29,862,401,000	12,634,390,208	42,3	35.321.070.000	23.005.415.780	65,13
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi	7,438,410,000	7,438,410,000	2,891,766,845	38,86	7.438.410.000	4.742.482.687	63,76
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	22,423,991,000	22,423,991,000	9,742,623,363	43,44	27.882.660.000	18.262.933.093	65,5

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 68.652.573.653,-** atau mencapai **53,33%** dari total pagu sebesar **Rp. 128.730.005.000,-**.

II.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan II untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.12 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II 2024

Jenis Belanja	PAGU AWAL	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Bel Pegawai	22.423.991.000	22.423.991.000	9,742,623,363	43,3%	27.882.660.000	18.262.933.093	65,5
Bel Barang	46.704.060.000	46.704.060.000	16.613.334.953	35,54%	46.704.060.000	24.216.375.256	51,85
Bel Modal	52.300.915.000	52.300.915.000	11,269,956,935.	21,54%	54.143.285.000	26.173.265.304	48,34
TOTAL	121.428.966.000	121.428.966.000	37,625,915,251	30,99%	128.730.005.000	68.652.573.653	53,33

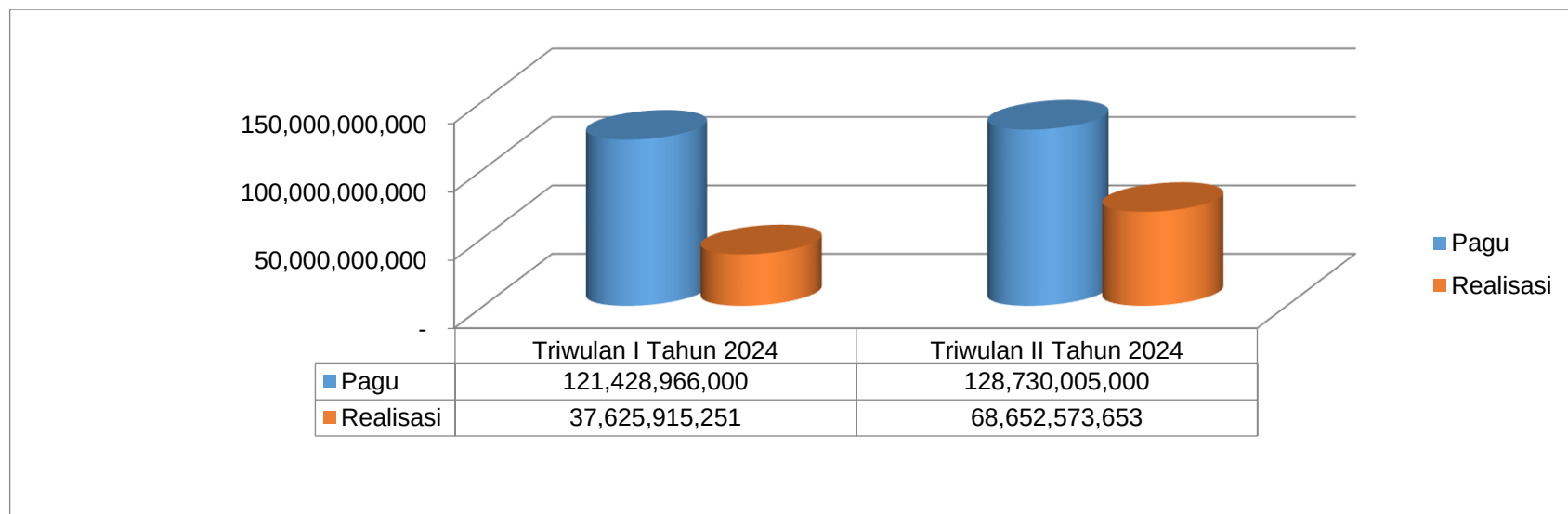
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2024 dari Triwulan II dengan Capaian Belanja Pegawai 65,5 %, Belanja Barang 51,85 % dan Belanja Modal 48,34 % dengan capaian keuangan 53,33 dari total Pagu Anggaran 2024

II.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan I-II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.13 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II 2024

Jenis Belanja	PAGU AWAL	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
RM	97.873.566.000	97.873.566.000	30.585.963.179	31,24	103.332.235.000	55.166.466.842	53.39
PNBP	8.555.400.000	8.555.400.000	7,039,952,072	82,27	8.555.400.000	7.791.416.749	91.07
SBSN	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	16.842.370.000	5.694.690.062	33.81
TOTAL	121.428.966.000	121.428.966.000	37,625,915,251	30,99%	128.730.005.000	68.652.573.653	53,33



Gambar II.12 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran Tahun 2024 Pada Triwulan I Sebesar 30,99 % dengan Pagu Rp 121.428.966.000 dengan realisasi Rp 37.625.915.251. Triwulan II Sebesar 53,33 % dengan Pagu Rp 128.730.005.000 dengan realisasi Rp 68.652.573.653

II.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.14 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	27.882.660.000	18.262.933.093	9.619.726.907
2	Belanja Barang	46.704.060.000	24.216.375.256	22.487.684.744
3	Belanja Modal	54.143.285.000	26.173.265.304	27.970.019.696
TOTAL		128.730.005.000	68.652.573.653	60.077.431.347

Tabel II.15 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	103.332.235.000	55.166.466.842	48.165.768.158
2	PNBP	8.555.400.000	7.791.416.749	763.983.251
3	SBSN	16.842.370.000	5.694.690.062	11.147.679.938
TOTAL		128.730.005.000	68.652.573.653	60.077.431.347

Dari total pagu anggaran BPTD Kelas II Lampung sebesar Rp 128.730.005.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 68.652.573.653,- (Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sehingga total dana yang belum terserap di lingkungan BPTD Kelas II Lampung adalah sebesar Rp 60.077.431.347,- (Enam Puluh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan yang belum terlaksanakan
 - Pembangunan Halte Sungai
 - Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Lampung
2. Kegiatan dengan Daya Serap Masih Rendah
 - Layanan Angkutan Jalan Perintis
 - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau
 - Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung

3. Sisa Belanja Barang – Rp 30.090.725.047,- (Tiga Puluh Milyar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah)
5. Sisa Belanja Modal Rp 41.030.958.065,- (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah)
6. Sisa Belanja Pegawai Rp 12.681.367.637,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan II Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.16 Efisiensi anggaran

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan I			Triwulan III		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan III)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	100%	31,01%	68,99%	100%	43,94%	56,14%
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	100%	40,45%	59,55%	100%	48,66%	51,34%
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25%	35,94%	64,06%	59,3%	64,34%	35,66%
4	SK4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100%	23,17%	76,83%	100%	30,49%	69,51%
5	SK5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	100%	5,9%	94,1%	100%	65,13%	34,87%
Total			85%	30,99%	69,01%	91,86%	53,33%	46,67%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 91,8%, dengan realisasi anggaran sebesar 30,99% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 53,33%.

II.3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah kebutuhan SDM di lingkungan BPTD Kelas II Lampung Pada Tahun 2023 sd 2025 adalah sebanyak 345. Sedangkan jumlah SDM di lingkungan lingkungan BPTD Kelas II Lampung saat ini adalah sejumlah 300 yang terdiri :

Tabel II.17 Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Lampung

NO.	KETERANGAN	ASN	PPNPN	TOTAL
1	KANTOR INDUK	88	46	134
2	UPPKB WAY URANG	23	14	37
3	SATPEL PELABUHAN BAKAUHENI	19	27	46
4	TERMINAL RAJABASA	30	31	61
5	TERMINAL BETAN SUBING	6	12	19
6	UPPKB BLAMBANGAN UMPU	0	2	2
7	UPPKB SIMPANG PEMATANG	0	1	1
	TOTAL	300		

Berdasarkan angka tersebut, realisasi Jumlah SDM di lingkungan BPTD Kelas II Lampung adalah sebanyak 271 Pegawai (85%). Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi perpecahan BPTD yang sebelumnya masih Bengkulu dan Lampung menjadi Lampung

Penambahan SDM di BPTD Kelas II Lampung merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi BPTD Kelas II Lampung. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan SDM di lingkungan BPTD Kelas II Lampung antara lain :

a. Redistribusi pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Lampung

Redistribusi ini dilaksanakan dengan pemindahan pegawai dari Satpel lain di lingkungan BPTD Kelas II Lampung. Dalam redistribusi ini perlu dicermati ABk dari unit kerja tersebut agar tidak mengganggu beban kerja Satpel tersebut

b. Mutasi dari unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

Mutasi ini merupakan perpindahan pegawai dari unit kerja di luar BPTD

Kelas II Lampung namun masih dalam Ditjen Perhubungan Darat.

c. Formasi CASN (CPNS dan PPPK)

Bahwa formasi CASN dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, biasanya dengan mempertimbangkan ABK dan kemampuan Anggaran oleh Kemenkeu. Biasanya jumlah alokasi formasi yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB hanya sebagian dari total usulan.

Tabel II.18 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM

No	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM
1	345	300	86%

II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran yaitu

1. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran. Dalam kegiatan kekurangan data pendukung dalam mengerjakan proyek menjadi kendala yaitu Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan;
2. Masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian data dukung pencairan dari pihak penyedia sehingga penyerapan menjadi mundur dari rencana;
3. Terdapat revisi anggaran, yang dimana rekomendasi dari Kemenkeu adalah maksimal 1 kali per triwulan.

Hal yang menyebabkan kegagalan pemenuhan kebutuhan SDM:

1. Pembatasan penerimaan PPNP (efek PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK);
2. Moratorium penerimaan CPNS.

BAB III

PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini terdapat 5 Sasaran Kegiatan Kerja Yaitu : 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, 2. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat, 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, 4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, 5. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung. Pada Tahun 2024 terdapat 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) .

Sepuluh Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) yaitu :

- Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dengan realisasi mencapai 100%
- Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi dengan realisasi mencapai 100%
- Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Prsentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal mencapai 100%

- Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dengan realisasi 100%
 - Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan realisasi mencapai 37,5%
 - Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, dan Batas Kecepatan dengan realisasi 100%
 - Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dengan realisasi 0%
 - Presentase Standarisasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor dengan realisasi mencapai 100%
 - Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan realisasi mencapai 100%
 - Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan realisasi mencapai 100%
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.

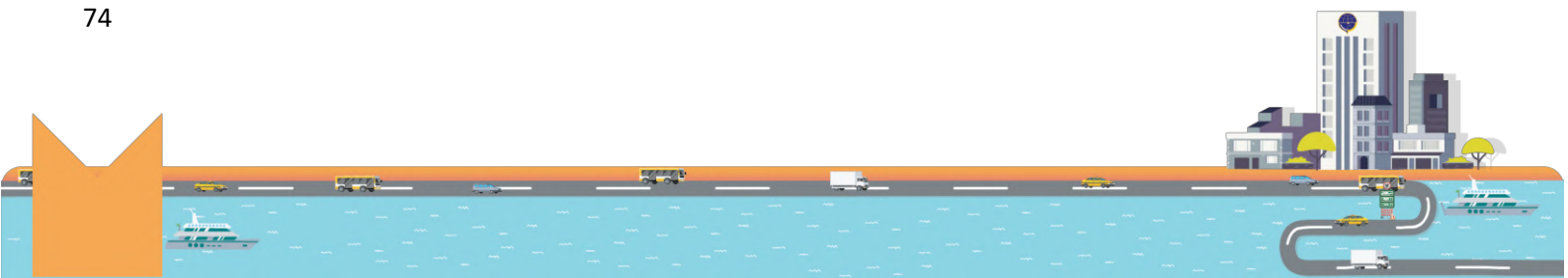
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATU AN	TAR GET	Tahun 2024			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				100%			100%
IKK 1.1	Prosentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI 1. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah - daerah tersebut	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%	TERCAPAI 1. Mengusulkan ke depannya untuk mengoperasikan seluruh terminal yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Lampung demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan fasilitas prasarana transportasi umum yang lebih baik dan nyaman 2. Menyediakan ruang tunggu dan tempat makan yang lebih baik bagi penumpang melalui usulan kegiatan di tahun – tahun berikutnya 3. Menyediakan ruang parkir bagi kendaraan penumpang untuk mendukung sistem Transit Oriented Development (TOD)	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	7	7	7	100%	TERCAPAI 1. Mengusulkan ke depannya untuk mengoperasikan seluruh pelabuhan dan dermaga yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Lampung demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan fasilitas prasarana transportasi umum yang lebih baik dan nyaman 2. Menyediakan ruang tunggu dan tempat makan yang lebih baik bagi penumpang melalui usulan kegiatan di tahun – tahun berikutnya 3. Menyediakan ruang parkir bagi kendaraan penumpang untuk mendukung sistem Transit Oriented Development (TOD)	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan



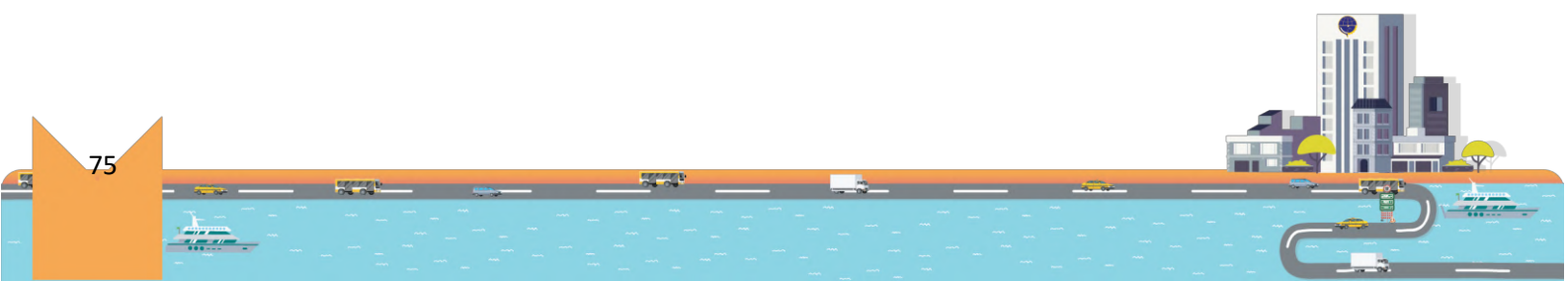
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					100%			
IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80	80	80	100%	TERCAPAI	1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional pelabuhan SDP 2. Memberikan reward dan punishment terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi					59,3%			
IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80	80	30	37,5%	TERCAPAI	1. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pemasangan perlengkapan jalan 2. Melakukan survei terkait titik – titik pemasangan baru perlengkapan jalan 3. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain terkait perlengkapan jalan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000	1000	0	0%	TERCAPAI	1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan. 2. Melaksanakan kegiatan pekan keselamatan jalan dengan tujuan memberikan edukasi tentang keselamatan transportasi kepada masyarakat 3. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK 3.7	Presentase Standarisasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	%	74,8	74,8	74,8	100%	TERCAPAI	1. Mengusulkan SDM penguji yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan 2. Melaksanakan perawatan alat kalibrasi 3. Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%			
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80	80	80	100%	TERCAPAI	1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terhadap tupoksi penyelenggaraan transportasi darat 2. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan transportasi darat kepada seluruh pegawai	Sub Bagian Tata Usaha
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100%			



IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	84	84	100%	TERCAPAI	1. Melakukan sosialisai terkait pelayanan perkantoran, administrasi dan surat menyurat 2. Mengusulkan SDM yang sesuai dengan kompetensi penyelenggaraan perkantora 3. Memberikan penghargaan kepada seksi atau subbag yang administrasi penyelenggaraan perkantorrannya baik dan rapih	Sub Bagian Tata Usaha
---------	--	-------	----	----	----	-------------	----------	--	------------------------------

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program							91,8%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program							83,7%

Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$)							8
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$)							2





PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	20
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

Bandar Lampung, 20 Desember 2023
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung


BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
NIP. 19710809 199703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
NIP. 19710809 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	20
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	7.057.387.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	26.144.939.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	37.215.023.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	21.149.216.000
5.	Pengelola Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	7.438.410.000
6.	Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	22.423.991.000

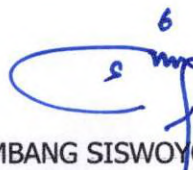
Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 2 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II LampungBAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
NIP. 19710809 199703 1 002



REVISI I

PERJANJIAN KINERJA 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG





**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

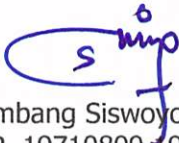
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.


Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
NIP. 19710809 199703 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

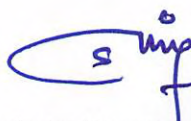
KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	7.057.387.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	27.987.309.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	37.215.023.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	21.149.216.000
5.	Pengelola Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	7.438.410.000
6.	Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	22.423.991.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Jakarta, Juni 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.


Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
NIP. 19710809 199703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr.

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Pihak Pertama

Kepala Subbagian Tata Usaha

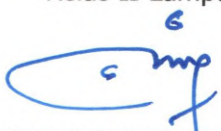
BUDI SANTOSO, S.Si.T., M.M.Tr..
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840603 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

Bandar Lampung, 2^o Desember 2023

Disetujui
Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung


BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Tata Usaha


BUDI SANTOSO, S.Si.T., M.M.Tr..
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840603 200604 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taofan Andriana, S.T.M.A.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

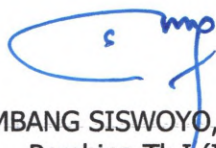
Bandar Lampung, 20 Desember 2023
Pihak Pertama
Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

TAOFAN ANDRIANA, S.T.M.A.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790321 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

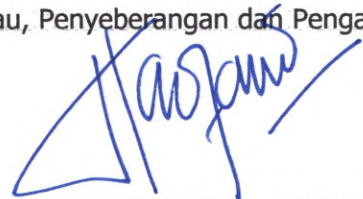
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

6


BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Bandar Lampung, 20 Desember 2023
Pihak Pertama
Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
Danau, Penyeberangan dan Pengawasan



TAOFAN ANDRIANA, S.T.M.A.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790321 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibrohim, SE., MM

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pihak Pertama

Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,
Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

6

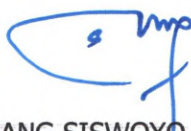
BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

IBROHIM, S.E., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19700131 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	20
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

6


BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Bandar Lampung, 20 Desember 2023
Pihak Pertama
Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,
Sungai, Danau dan Penyeberangan



IBROHIM, S.E., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19700131 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djoko Srijanto, ATD., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Lampung.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

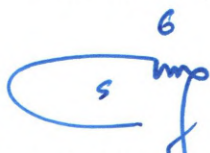
Pihak Pertama
Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau
dan Penyeberangan

DJOKO SRIJANTO, ATD., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680417 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung



BAMBANG SISWOYO, S.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Bandar Lampung, 20 Desember 2023
Pihak Pertama
Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai,
Danau dan Penyeberangan



DJOKO SRIJANTO, ATD., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680417 199103 1 002



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr.

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 24 Juni 2024

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Pihak Pertama

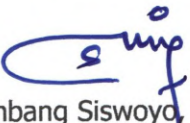
Kepala Subbagian Tata Usaha

Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr..
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840603 200604 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

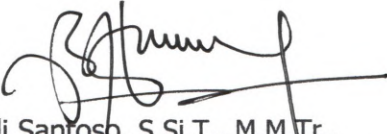
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2023
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

Disetujui
Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung


Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Bandar Lampung, 24 Juni 2024

Pihak Pertama
Kepala Subbagian Tata Usaha


Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr..
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840603 200604 1 002



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taofan Andriana, S.T.M.A.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

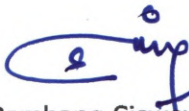
Bandar Lampung, 24 Juni 2024
Pihak Pertama
Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Taofan Andriana, S.T.M.A.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790321 200012 1 003

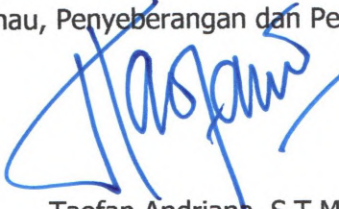
REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung


Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Bandar Lampung, 24 Juni 2024
Pihak Pertama
Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
Danau, Penyeberangan dan Pengawasan


Taofan Andriana, S.T.M.A.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790321 200012 1 003



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Setiawan, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

Pihak Pertama

Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,
Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

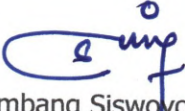
Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Dedi Setiawan, S.Sos
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19690820 199101 1 001

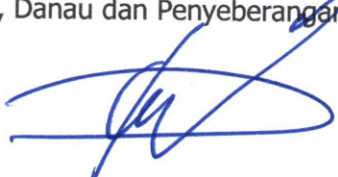
REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung


Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Bandar Lampung, 24 Juni 2024
Pihak Pertama
Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,
Sungai, Danau dan Penyeberangan


Dedi Setiawan, S.Sos
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19690820 199101 1 001001



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djoko Srijanto, ATD., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Bambang Siswoyo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas II Lampung.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 24 Juni 2024

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

Pihak Pertama

Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau
dan Penyeberangan

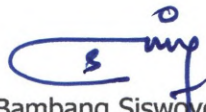
Bambang Siswoyo, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Djoko Srijanto, ATD., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680417 199103 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung


Bambang Siswono, S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710809 199703 1 002

Bandar Lampung, 24 Juni 2024
Pihak Pertama
Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai,
Danau dan penyeberangan


Djoko Srijanto, ATD., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680417 199103 1 002

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 4,557,387,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Rp 2,782,179,000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Rajabasa													Rp 7,000,000,000	
						Revitalisasi/Peningkatan Terminal Air Sebakul-Bengkulu Tahap II (SBSN)													Rp 15,000,000,000	
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4	Pengelolaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rp 1,362,760,000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pembangunan Halte Sungai													Rp 2,500,000,000	
						Pengadaan Rambu Sungai dan Danau													Rp 1,000,000,000	
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 300,000,000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	0	0	0	20	20	30	40	50	60	70	75	80	Rp 1,111,792,000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)													Rp 1,129,306,000	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan													Rp 30,502,896,000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	20	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp -	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Peryeberangan
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	Rp 350,000,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Peryeberangan
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPPKB	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	Rp 2,565,629,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Peryeberangan
						Pemeliharaan Alat Uji dan Alat kalibrasi Kendaraan Bermotor													Rp 555,400,000	
SK5	Meningkatnya Kualitas	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan	Nilai	80	Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 15,000,000,000	Sub Bagian Tata Usaha
						Pengelolaan Bidang Ketatausahaan													Rp 3,567,482,000	
						Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan													Rp 287,855,000	
						Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan													Rp 290,375,000	
						Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana													Rp 300,164,000	
						Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas													Rp 350,087,000	
						Monitoring Pengendalian Lalu Lintas													Rp 349,978,000	
						Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan													Rp 703,275,000	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	Rp 7,438,410,000	Sub Bagian Tata Usaha
						Layanan Perkantoran (Gaji)													Rp 22,423,991,000	

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung


BAMBANG SISWOYO, ST., M.T.
NIP. 19710809 199703 1 002

REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SK1		IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 4,557,387,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,782,179,000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Revitalisasi/Peningkatan Terminal Tipe A Rajabasa													Rp 7,000,000,000	
						Revitalisasi/Peningkatan Terminal Air Sebakul-Bengkulu Tahap II (SBSN)													Rp 16,842,370,000	
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	7	Pengelolaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Rp 1,362,760,000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pembangunan Halte Sungai													Rp 2,500,000,000	
						Pengadaan Rambu Sungai dan Danau													Rp 1,000,000,000	
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM Pelabuhan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 300,000,000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	0	0	0	20	20	30	40	50	60	70	75	80	Rp 1,111,792,000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)													Rp 1,129,306,000	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan													Rp 30,502,896,000	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	Rp 350,000,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPPKB	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	Rp 2,565,629,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pemeliharaan Alat Uji dan Alat kalibrasi Kendaraan Bermotor													Rp 555,400,000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5,849,216,000.00	Sub Bagian Tata Usaha
						Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung													Rp 15,000,000,000	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	Rp 7,438,410,000	Sub Bagian Tata Usaha
						Layanan Perkantoran (Gaji)													Rp 22,423,991,000	

Bandar Lampung, 24 Juni 2024



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung



BAMBANG SISWOYO, ST., M.T.
NIP. 19710809 199703 1 002

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung

Bulan : Januari Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100	100%	Rp 4,557,387,000	100%	100%	Rp0	100%	0%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan sudah terlayani 100% dengan realisasi masih 0	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	2	2	100%	Rp 24,782,179,000	100%	2	Rp2,233,022,290	100%	9%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% , Untuk Revitalisasi Terminal Air Sebakul dalam pengerjaan dan ada tambahan kegiatan Peningkatan Terminal TTA Rajabasa emplacement dan sudah dalam pengerjaan	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Rajabasa											Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Rajabasa yaitu melaksanakan revitaliasasi terminal sesuai jadwal kontrak kerja		
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Air Sebakul (SBSN)											Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Air Sebakul yaitu melaksanakan pembangunan terminal sesuai jadwal kontrak kerja		
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	3	Pembangunan Halte Sungai Mesuji	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	4	4	100%	Rp4,862,760,000	100%	4	Rp75,285,000	100%	1.55%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 1,55% terdiri kegiatan Pembangunan Halte Sungai Mesuji yang masih tahap persiapan, Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pembangunan Halte Sungai Mesuji masih tahap persiapan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan											Memastikan Operasional di Pelabuhan meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat		
						Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau											Pengadaan Rambu Sungai dan Danau dalam tahap persiapan		
SK 2		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp300,000,000	100%	80	Rp49,762,494.42	100%	17%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 17%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari			Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output				Capaian Anggaran
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan jalan disetiap ruas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Bengkulu dan Lampung	80	80	100%	Rp32,743,994,000	100%	0	Rp0	100%	0.00%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Bantuan Teknis, LRK, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dengan realisasi anggaran mencapai 0%	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)											Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan		
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)											Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kebutuhan pemasangan perlengkapan jalan		
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terpasangnya batas kecepatan sesuai dengan ketentuan	20	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp0	0	0.00%	BPTD Kelas II Tahun Anggaran 2024 tidak ada Pembangunan ZOSS	Mengevaluasi dan menyurvei kegiatan pembangunan di tahun berikutnya
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.	1000	0	0%	Rp	350,000,000	100%	0	Rp0	0	0	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada Pekan Keselamatan Jalan Melalui Sosialisasi kepada Siswa tentang Sadar Lalu Lintas dan diadakan Jalan Sehat dan Sepeda Santai di Acara Puncak PKJ	Mengevaluasi tentang kekurangan-kekurangan saat pelaksanaan PKJ tahun sebelumnya dan perlu meningkatkan kemeriahan acara di tahun sekarang	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPUBKB	Presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor(UPUBK B) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah	74.8	74.8	100%	Rp	3,121,029,000	100%	74.8	Rp	115,918,000	100%	3.71%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeliharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 3,71%	Mengusulkan SDM penguji kendaraan bermotor yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraa n Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	80	80	100%	Rp	20,849,216,000	100%	80	Rp293,140,617	100%	1.41%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dan Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Lampung	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha
					80	Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung											Mempersiapkan dokumen-dokumen dan hal lainnya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan		
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaran perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83.98	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	84	84	100%	Rp33,241,777,000	100%	83,98	Rp	3,883,450,580	100%	11.68%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaran perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor dan Gaji pegawai realisasi anggaran mencapai 11,68 %	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna	Sub Bagian Tata Usaha
					83.98	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan Pegawai)											Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai		

**Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung**

Bulan : Februari Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari		% Capaian Bulan Februari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100	100%	Rp 4,557,387,000	100%	100%	Rp0	100%	0%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan sudah terlayani 100% dengan realisasi masih 0	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	2	2	100%	Rp 24,782,179,000	100%	2	Rp5,274,175,453	100%	21%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% , Untuk Revitalisasi Terminal Air Sebakul dalam pengerjaan dan ada tambahan kegiatan Peningkatan Terminal TTA Rajabasa emplacement dan sudah dalam pengerjaan	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	3	Pembangunan Halte Sungai Mesuji	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	4	4	100%	Rp4,862,760,000	100%	4	Rp336,795,000	100%	6.93%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 1,55% terdiri kegiatan Pembangunan Halte Sungai Mesuji yang masih tahap persiapan, Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pembangunan Halte Sungai Mesuji masih tahap persiapan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		SK 2	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp300,000,000	100%	80	Rp74,607,793.95	100%	25%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 25%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari		% Capaian Bulan Februari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran					
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan jalan disetiap ruas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Bengkulu dan Lampung	80	80	100%	Rp32,743,994,000	100%	0	Rp5,712,812,800	100%	17.45%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Bantuan Teknis, LRK, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dengan realisasi anggaran mencapai 17,45%	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		
						Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)											Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan				
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)											Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kebutuhan pemasangan perlengkapan jalan				
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terpasangnya batas kecepatan sesuai dengan ketentuan	20	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp0	0	0.00%	BPTD Kelas II Tahun Anggaran 2024 tidak ada Pembangunan ZOSS	Mengevaluasi dan menyurvei kegiatan pembangunan di tahun berikutnya	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.	1000	0	0%	Rp	350,000,000	100%	0	Rp0	0	0	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada Pekan Keselamatan Jalan Melalui Sosialisasi kepada Siswa tentang Sadar Lalu Lintas dan diadakan Jalan Sehat dan Sepeda Santai di Acara Puncak PKJ	Mengevaluasi tentang kekurangan-kekurangan saat pelaksanaan PKJ tahun sebelumnya dan perlu meningkatkan kemeriahan acara di tahun sekarang	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPUBKB	Presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor(UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah	74.8	74.8	100%	Rp	3,121,029,000	100%	74.8	Rp	435,429,508	100%	13.95%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeliharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 13,95%	Mengusulkan SDM penguji kendaraan bermotor yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Berkurangnya daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran ODOL	80	80	100%	Rp	20,849,216,000	100%	80	Rp737,024,326	100%	3.54%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dan Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Lampung	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha	
						Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung	Mempersiapkan dokumen-dokumen dan hal lainnya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan														
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaran perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83.98	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan perkantoran ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna,	84	84	100%	Rp33,241,777,000	100%	83,98	Rp	7,349,752,435	100%	22.11%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaran perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor dan Gaji pegawai realisasi anggaran mencapai 22,11%	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna	Sub Bagian Tata Usaha	
						Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan Pegawai)	Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai														

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung

Bulan : Maret Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100%	Rp 4,557,387,000	100%	100%	Rp454,545,460	100%	10%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan sudah terlayani 100% dengan realisasi masih 10%	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	2	2	100%	Rp 24,782,179,000	100%	2	Rp9,618,748,801	100%	39%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% , Untuk Revitalisasi Terminal Air Sebakul dalam pengerjaan dan ada tambahan kegiatan Peningkatan Terminal TTA Rajabasa emplacement dan sudah dalam pengerjaan	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Rajabasa	Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Rajabasa yaitu melaksanakan revitaliasasi terminal sesuai jadwal kontrak kerja												
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Air Sebakul (SBSN)	Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Air Sebakul yaitu melaksanakan pembangunan terminal sesuai jadwal kontrak kerja												
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	3	Pembangunan Halte Sungai Mesuji	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	4	4	100%	Rp4,862,760,000	100%	4	Rp534,011,000	100%	10.98%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 10,98% terdiri kegiatan Pembangunan Halte Sungai Mesuji yang masih tahap persiapan, Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pembangunan Halte Sungai Mesuji masih tahap persiapan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Memastikan Operasional di Pelabuhan meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat												
						Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau dalam tahap persiapan												
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp300,000,000	100%	80	Rp121,379,673.02	100%	40%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 40%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp300,000,000	100%	80	Rp121,379,673.02	100%	40%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 40%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran					
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan jalan disetiap ruas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Bengkulu dan Lampung	80	80	100%	Rp32,743,994,000	100%	0	Rp11,992,302,260	100%	36.62%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Bantuan Teknis, LRK, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dengan realisasi anggaran mencapai 36,62%	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		
						Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)											Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan				
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)											Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kebutuhan pemasangan perlengkapan jalan				
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terpasangnya batas kecepatan sesuai dengan ketentuan	20	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp0	0	0.00%	BPTD Kelas II Tahun Anggaran 2024 tidak ada Pembangunan ZOSS	Mengevaluasi dan menyurvei kegiatan pembangunan di tahun berikutnya	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.	1000	0	0%	Rp	350,000,000	100%	0	Rp0	0	0	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada Pekan Keselamatan Jalan Melalui Sosialisasi kepada Siswa tentang Sadar Lalu Lintas dan diadakan Jalan Sehat dan Sepeda Santai di Acara Puncak PKJ	Mengevaluasi tentang kekurangan-kekurangan saat pelaksanaan PKJ tahun sebelumnya dan perlu meningkatkan kemeriahan acara di tahun sekarang	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPUBKB	Presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor(UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemangku	74.8	74.8	100%	Rp	3,121,029,000	100%	74.8	Rp	1,026,047,072	100%	32.88%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeliharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 32,88%	Mengusulkan SDM penguji kendaraan bermotor yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Berkurangnya daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran ODOL	80	80	100%	Rp	20,849,216,000	100%	80	Rp1,244,490,777	100%	5.97%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dan Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Lampung	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha	
						Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung												Mempersiapkan dokumen-dokumen dan hal lainnya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan			
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83.98	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan perkantoran ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna,	84	84	100%	Rp33,241,777,000	100%	83,98	Rp12,634,390,208	100%	38.01%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor dan Gaji pegawai realisasi anggaran mencapai 38,01%	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna	Sub Bagian Tata Usaha		
						Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan Pegawai)											Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai				

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung

Bulan : April Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan April				Realisasi Bulan April		% Capaian Bulan April		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100%	Rp 4,557,387,000	100%	100%	Rp909,090,920	100%	20%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan sudah terlayani 100% dengan realisasi masih 20%	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	2	2	100%	Rp 26,624,549,000	100%	2	Rp10,170,327,266	100%	38%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% , Untuk Revitalisasi Terminal Air Sebakul dalam pengerjaan dan ada tambahan kegiatan Peningkatan Terminal TTA Rajabasa emplacement dan sudah dalam pengerjaan	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Rajabasa	Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Rajabasa yaitu melaksanakan revitaliasasi terminal sesuai jadwal kontrak kerja												
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Air Sebakul (SBSN)	Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Air Sebakul yaitu melaksanakan pembangunan terminal sesuai jadwal kontrak kerja												
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	3	Pembangunan Halte Sungai Mesuji	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	4	4	100%	Rp4,862,760,000	100%	4	Rp610,236,000	100%	12.55%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 12,55% terdiri kegiatan Pembangunan Halte Sungai Mesuji yang masih tahap persiapan, Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pembangunan Halte Sungai Mesuji masih tahap persiapan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Memastikan Operasional di Pelabuhan meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat												
						Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau dalam tahap persiapan												
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp300,000,000	100%	80	Rp124,525,254.42	100%	42%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 42%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan April				Realisasi Bulan April		% Capaian Bulan April		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran					
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan jalan disetiap ruas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Bengkulu dan Lampung	80	80	100%	Rp32,743,994,000	100%	0	Rp11,992,302,260	100%	36.62%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Bantuan Teknis, LRK, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dengan realisasi anggaran mencapai 36,62%	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		
						Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)												Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan			
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)												Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kebutuhan pemasangan perlengkapan jalan			
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terpasangnya batas kecepatan sesuai dengan ketentuan	20	0	0%	Rp	-	0	Rp0	0	0.00%	BPTD Kelas II Tahun Anggaran 2024 tidak ada Pembangunan ZOSS	Mengevaluasi dan menyurvei kegiatan pembangunan di tahun berikutnya	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.	1000	0	0%	Rp	350,000,000	100%	0	Rp0	0	0	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada Pekan Keselamatan Jalan Melalui Sosialisasi kepada Siswa tentang Sadar Lalu Lintas dan diadakan Jalan Sehat dan Sepeda Santai di Acara Puncak PKJ	Mengevaluasi tentang kekurangan-kekurangan saat pelaksanaan PKJ tahun sebelumnya dan perlu meningkatkan kemeriahan acara di tahun sekarang	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPUBKB	Presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor(UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemangku	74.8	74.8	100%	Rp	3,121,029,000	100%	74.8	Rp	1,781,504,161	100%	57.08%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeliharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 57,08%	Mengusulkan SDM penguji kendaraan bermotor yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Berkurangnya daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran ODOL	80	80	100%	Rp	20,849,216,000	100%	80	Rp1,244,490,777	100%	5.97%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dan Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Lampung	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha	
						Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung	Mempersiapkan dokumen-dokumen dan hal lainnya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan														
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83.98	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan perkantoran ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna,	84	84	100%	Rp33,241,777,000	100%	83,98	Rp15,362,301,419	100%	46.21%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor dan Gaji pegawai realisasi anggaran mencapai 46,21%	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna	Sub Bagian Tata Usaha		
						Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan Pegawai)	Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai														

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung

Bulan : Mei Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Mei				Realisasi Bulan Mei		% Capaian Bulan Mei		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100%	Rp 4,557,387,000	100%	100%	Rp1,363,636,380	100%	30%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan sudah terlayani 100% dengan realisasi keuangan masih 30%	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	2	2	100%	Rp 26,624,549,000	100%	2	Rp10,199,938,581	100%	38%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% , Untuk Revitalisasi Terminal Air Sebakul dalam pengerjaan dan ada tambahan kegiatan Peningkatan Terminal TTA Rajabasa emplacement dan sudah dalam pengerjaan finisihing	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Rajabasa	Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Rajabasa yaitu melaksanakan revitalisasasi terminal sesuai jadwal kontrak kerja												
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Air Sebakul (SBSN)	Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Air Sebakul yaitu melaksanakan pembangunan terminal sesuai jadwal kontrak kerja												
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	3	Pembangunan Halte Sungai Mesuji	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	4	4	100%	Rp4,862,760,000	100%	4	Rp984,620,212	100%	20.25%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 20,25% terdiri kegiatan Pembangunan Halte Sungai Mesuji yang masih tahap persiapan, Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pembangunan Halte Sungai Mesuji masih tahap persiapan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Memastikan Operasional di Pelabuhan meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat												
						Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau dalam tahap persiapan												
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp300,000,000	100%	80	Rp124,525,254.42	100%	42%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 42%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp300,000,000	100%	80	Rp124,525,254.42	100%	42%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 42%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Mei				Realisasi Bulan Mei		% Capaian Bulan Mei		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran					
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan jalan disetiap ruas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Bengkulu dan Lampung	80	80	100%	Rp32,743,994,000	100%	20	Rp15,905,101,220	100%	48.57%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Bantuan Teknis, LRK, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dengan realisasi anggaran mencapai 48,57%	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		
						Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)											Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan				
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)											Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kebutuhan pemasangan perlengkapan jalan				
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terpasangnya batas kecepatan sesuai dengan ketentuan	20	0	0%	Rp	-	0	Rp0	0	0.00%	BPTD Kelas II Tahun Anggaran 2024 tidak ada Pembangunan ZOSS	Mengevaluasi dan menyurvei kegiatan pembangunan di tahun berikutnya	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.	1000	0	0%	Rp	350,000,000	100%	0	Rp0	0	0	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada Pekan Keselamatan Jalan Melalui Sosialisasi kepada Siswa tentang Sadar Lalu Lintas dan diadakan Jalan Sehat dan Sepeda Santai di Acara Puncak PKJ	Mengevaluasi tentang kekurangan-kekurangan saat pelaksanaan PKJ tahun sebelumnya dan perlu meningkatkan kemeriahan acara di tahun sekarang	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPUBKB	Presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor(UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemangintah	74.8	74.8	100%	Rp	3,121,029,000	100%	74.8	Rp	1,313,065,990	100%	42.07%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeleiharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 42,07%	Mengusulkan SDM penguji kendaraan bermotor yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Berkurangnya daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran ODOL	80	80	100%	Rp	20,849,216,000	100%	80	Rp6,251,576,009	100%	29.98%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dan Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Lampung	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha	
						Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung												Mempersiapkan dokumen-dokumen dan hal lainnya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan			
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	83.98	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan perkantoran ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna,	84	84	100%	Rp33,241,777,000	100%	83,98	Rp20,206,083,406	100%	60.79%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor dan Gaji pegawai realisasi anggaran mencapai 60,79%	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna	Sub Bagian Tata Usaha		
						Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan Pegawai)											Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai				

Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung

Bulan : Juni Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100	100%	Rp 4,557,387,000	100%	100%	Rp1,363,636,380	100%	30%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan sudah terlayani 100% dengan realisasi keuangan masih 30%	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	3	3	100%	Rp 26,624,549,000	100%	3	Rp13,417,865,693	100%	50%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% , Untuk Revitalisasi Terminal Air Sebakul dalam pengerjaan dan ada tambahan kegiatan Peningkatan Terminal TTA Rajabasa emplacement dan sudah dalam pengerjaan finisihing	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Rajabasa	Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Rajabasa yaitu melaksanakan revitalisasi terminal sesuai jadwal kontrak kerja												
						Revitalisasi / Peningkatan Terminal Air Sebakul (SBSN)	Rencana Tindak Lanjut Revitalisasi Terminal Air Sebakul yaitu melaksanakan pembangunan terminal sesuai jadwal kontrak kerja												
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4	Pembangunan Halte Sungai Mesuji	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	4	4	100%	Rp4,862,760,000	100%	4	Rp1,059,405,212	100%	21.79%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 21,79% terdiri kegiatan Pembangunan Halte Sungai Mesuji yang masih tahap persiapan, Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pembangunan Halte Sungai Mesuji masih tahap persiapan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Pengelolaan Ops Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Memastikan Operasional di Pelabuhan meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat												
						Pengadaan Ranmbu Sungai dan Danau	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau dalam tahap persiapan												
SK2		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp300,000,000	100%	80	Rp124,525,254.42	100%	42%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 42%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni			Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output				Capaian Anggaran	
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan jalan disetiap ruas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Bengkulu dan Lampung	80	80	100%	Rp32,743,994,000	100%	30	Rp21,797,482,000	100%	66.57%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Bantuan Teknis, LRK, serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dengan realisasi anggaran mencapai 66,57%	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
						Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)												Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan		
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)												Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kebutuhan pemasangan perlengkapan jalan		
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terpasangnya batas kecepatan sesuai dengan ketentuan	20	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp0	0	0.00%	BPTD Kelas II Tahun Anggaran 2024 tidak ada Pembangunan ZOSS	Mengevaluasi dan menyurvei kegiatan pembangunan di tahun berikutnya	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.	1000	0	0%	Rp	350,000,000	100%	0	Rp0	0	0	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada Pekan Keselamatan Jalan Melalui Sosialisasi kepada Siswa tentang Sadar Lalu Lintas dan diadakan Jalan Sehat dan Sepeda Santai di Acara Puncak PKJ	Mengevaluasi tentang kekurangan-kekurangan saat pelaksanaan PKJ tahun sebelumnya dan perlu meningkatkan kemeriahan acara di tahun sekarang	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPUBKB	Presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor(UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta	74.8	74.8	100%	Rp	3,121,029,000	100%	74.8	Rp	1,313,065,990	100%	42.07%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeliharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 42,07%	Mengusulkan SDM penguji kendaraan bermotor yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
				Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi	Melaksanakan Pemeliharaan Alat uji kalibrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku agar alat dalam kondisi baik untuk menguji kendaraan															
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraa n Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Berkurangnya daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran ODOL	80	80	100%	Rp	20,849,216,000	100%	80	Rp6,358,337,341	100%	30.50%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dan Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Lampung	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha
						Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung													Mempersiapkan dokumen-dokumen dan hal lainnya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaran perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna,	84	84	100%	Rp33,241,777,000	100%	84	Rp23,005,415,780	100%	69.21%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaran perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor dan Gaji pegawai realisasi anggaran mencapai 69,21%	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna	Sub Bagian Tata Usaha	
						Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan Pegawai)											Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai			